



LAPORAN TAHUNAN

2022

Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku
Usaha Pangan Olahan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan penyusunan kegiatan Laporan Tahunan 2022 di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan selama tahun 2022 telah diselesaikan dengan baik.

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan seputar kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan. Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terus berbenah untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat maupun pelaku usaha pangan olahan. Terima kasih kepada seluruh tim Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan atas hasil pencapaian tahun 2022. Keberhasilan dalam penyelesaian kegiatan ini didukung juga oleh kerjasama yang baik dengan UPT BPOM dan para stakeholder.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi pelaksanaan kegiatan yang lebih baik lagi. Laporan Tahunan 2022 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2022 serta mendorong peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai dalam memberikan perbaikan kinerja di masa mendatang.



Jakarta, Maret 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yuni', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dra. Yuni Nugrahanti Soedarto, Apt., MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
<i>HIGHLIGHT</i>	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
VISI, MISI, DAN BUDAYA ORGANISASI	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA	6
2.1 SUMBERDAYA MANUSIA	6
DATA PEGAWAI	6
KEBUTUHAN PEGAWAI	9
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM	11
2.2 SARANA DAN PRASARANA	11
2.3 ANGGARAN	12
BAB III HASIL KEGIATAN	16
3.1.1 Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	21
3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	28

3.2.1 Persentase Kab/Kota yang menerapkan Peraturan Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga Pangan Rumah Tangga (IRTP)	31
3.2.2 Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	33
3.3.1 Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan.....	58
3.4.1 Jumlah PKP/Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan.....	66
3.4.2 Indeks Pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	73
3.5.1Tingkat efektivitas KIE Makanan	74
3.5.2 Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan.....	79
3.6.1 Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	87
3.7.1 Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	96
3.8.1 Indeks RB Direktorat PMPUPO	106
3.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	108
3.10.1 Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di Dit. PMPU	116
3.11.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO.....	119
BAB IV PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2022.....	7
Tabel 2 Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK Tahun 2022	10
Tabel 3 Realisasi anggaran per output.....	12
Tabel 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2023	13
Tabel 5 Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan.....	14
Tabel 6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 2022.....	17
Tabel 7 Capaian IKK Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2022	18
Tabel 8 Nominator Lomba Desa Pangan Aman.....	51
Tabel 9 Materi Bimtek Kader Keamanan Pangan.....	60
Tabel 10 Link hasil podcast di Sportify	65
Tabel 11 Jumlah peserta Jamnas yang mendapat sosialisasi BPOM.....	82
Tabel 12 Tabel 12 Aplikasi yang dikembangkan oleh Dit.PMPUPO	118
Tabel 13 Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO	4
Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	6
Gambar 3 Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2022	8
Gambar 4 Sebaran Pegawai berdasarkan Usia	9
Gambar 5 Realisasi Anggaran 2020-2022	13
Gambar 6 Peta Strategis Direktorat PMPUPO Tahun 2020-2024	16
Gambar 7 Pelaksanaan Pendampingan CPPOB di UMKM Pangan Olahan	23
Gambar 8 Launching program Pangan Aman Goes to Campus oleh Kepala Badan POM	24
Gambar 9 Konsep Pangan Aman Goes to Campus.....	26
Gambar 10 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mahasiswa program PAGC secara Daring.....	27
Gambar 11 Mekanisme monitoring dan evaluasi mahasiswa pelaksana PAGC	28
Gambar 12 Training CPPOB : Bimtek CPPOB dan PKP	30
Gambar 13 post Instagram Feed.....	36
Gambar 14 Buku saku (Handbook) Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional.....	37
Gambar 15 Tampilan Front End dan Back End Sipaman Tahun 2022	38
Gambar 16 Pertemuan Teknis Germas SAPA bersama Ibu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	41
Gambar 17 Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Program Pangan Jajanan	45
Gambar 18 Work Plan AHC4 2022 – 2025	47
Gambar 19 Pemenang Lomba Sekolah dengan PJAS Aman.....	49
Gambar 20 Pemenang lomba Desa Pangan Aman.....	52
Gambar 21 Penerima Penghargaan Juara 1 Pasar Nyanggelan Denpasar, Bali oleh Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, S. Sos., M. Si.....	55
Gambar 22 Penerima Penghargaan Juara 2 Pasar Mayestik Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta oleh Direktur Utama Perumda Jaya Bapak Tri Prasetyo	55
Gambar 23 Penerima Penghargaan Juara 3 Pasar Niten Kab. Bantul DIY, Kabid Sarana Perdagangan Ibu Arum Bidayati, S.IP, MPA	55

Gambar 24 Foto Bersama Para Pemenang	56
Gambar 25 Pencanangan jambore Nutrisi Seimbang di Morotai	57
Gambar 26 Kegiatan Edukasi keamanan pangan di Desa Biau Malaka NTT	58
Gambar 27 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	60
Gambar 28 Pelaksanaan Bimtek KKPN Dasawisma di Mataram NTB	62
Gambar 29 Pelaksanaan Bimtek KKPN Dasawisma di Bandung, Jawa Barat	63
Gambar 30 Pelaksanaan Bimtek KKPN di Suarabay, Jawa Timur	63
Gambar 31 KIE oleh KKPN (menggunakan rompi KKPN).....	64
Gambar 32 KIE oleh KKPN Materi 5 Kunci KP.....	64
Gambar 33 Proses perekaman podcast	65
Gambar 34 Peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Ritel Tradisional.....	69
Gambar 35 Monev Fasilitator Nasional Keamanan Pangan di Ritel.....	70
Gambar 36 Pelatihan PKP Pertama.....	71
Gambar 37 Pembukaan Pelatihan PKP Tingkat Pertama oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.....	72
Gambar 38 Presentasi dan Diskusi pada Pelatihan PKP Tingkat Pertama	72
Gambar 39 KIE oleh Kader melalui tatap muka dan webinar	75
Gambar 40 Penandatanganan MoU antara BPOM dengan Kwarnas Gerakan Pramuka.....	81
Gambar 41 Peserta Jamnas tanggal 18	83
Gambar 42 Contoh Seri Keamanan Pangan dalam webinar Paman Kece	85
Gambar 43 Pelaksanaan webinar bersama Ibu Sibux Orami dan Direktur PMPUPO	86
Gambar 44 Pelaksanaan Asistensi Regulasi di Banda Aceh	90
Gambar 45 Penandatanganan Rekomendasi Asistensi Regulasi di Banten	91
Gambar 46 Dokumentasi Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat.....	93
Gambar 47 Dokumentasi Advokasi Keamanan Pangan Regional Tengah dan Timur	94
Gambar 48 Sosialisasi Keamanan Pangan melalui di Kota Cirebon bersama tokoh masyarakat Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.	95
Gambar 49 Capaian dari program Pendampingan UMK.....	98

Gambar 50 Program Orang Tua Angkat untuk UMK.....	100
Gambar 51 Rata-rata Skor Pengetahuan Kader Keamanan Pangan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Bimbingan Teknis.....	101
Gambar 52 Evaluasi UPT BPOM dalam melaksanakan program PJAS	102
Gambar 53 Dokumentasi Monitoring dan evaluasi Desa Pangan Aman melalui GKPD Online ...	103
Gambar 54 Aplikasi GKPD Online	104
Gambar 55 Subsite PM.....	105
Gambar 56 monitoring dan evaluasi	106
Gambar 57 Study banding ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung-Bali.	107
Gambar 58 Forum Koordinasi Teknis	108
Gambar 59 Kursus Bahasa Inggris bersama Lister	109
Gambar 60 Bimtek Perencanaan Indikator dan Target Kegiatan yg SMART: SMART Plan	110
Gambar 61 Bimtek Pelatihan Teknik Advokasi dan Negosiasi	110
Gambar 62 Awareness ISO 9001:2015 Manajemen Mutu.....	111
Gambar 63 Bimbingan Teknis ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.....	112
Gambar 64 Capacity building dilaksanakan di Bali, 14 - 17 September 2022	112
Gambar 65 Workshop Analisis data sebagai dasar kebijakan: Pivot Tabel.....	113
Gambar 66 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara 2023	114
Gambar 67 Bimtek Kearsipan bagi Petugas Arsip Dit PMPUPO Tahun 2022	115
Gambar 68 Tampilan Dashboard BOC untuk data Gerakan Keamanan Pangan Desa	116
Gambar 69 Rapat monitoring dan evaluasi bulanan.....	119
Gambar 70 Pengelolaan Satker	120

HIGHLIGHT

Selama tahun 2022, unit kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerima beberapa penghargaan dan prestasi diantaranya:

Penyelenggara Pelayanan Publik kategori "Pelayanan Prima"

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima piagam penghargaan dari BPOM sebagai **Unit Penyelenggara Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022**.



Sebagai Unit Pelayanan Predikat Kepatuhan tertinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Ombudsman

OMBUDSMAN RI
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENYELENGGAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022

Presensi/Instansi Pinalat : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Periode Observasi : Agustus - November 2022

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengabdian	
1	Direktorat Pengawasan Kosmetika	21,29	24,21	24,24	21,53	91,28
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika	21,46	20,67	24,24	21,53	88,1
3	Direktorat Registrasi Obat	21,46	23,63	24,24	21,53	90,86
4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	21,46	24,21	24,24	21,53	91,45
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	21,65	22,63	24,24	21,53	90,46
6	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	19,47	25,49	24,24	21,53	90,73
7	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	21,46	23,29	24,24	21,53	90,52
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	21,65	22,63	24,24	21,53	90,26
Nilai Akhir dan Zona					91,45	
Kategori					A	
Opini					Kualitas Tinggi	

Keterangan Kategori Penilaian Akhir:

Interval Nilai	Kategori	Opini
90,00-100,00	A	Kualitas Tinggi
80,00-89,99	B	Kualitas Tinggi
64,00-79,99	C	Kualitas Sedang
50,00-63,99	D	Kualitas Rendah
0-49,99	E	Kualitas Terendah



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima penghargaan sebagai **Unit Pelayanan Predikat Kepatuhan Tertinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2022** berdasarkan hasil evaluasi **Ombudsman** memperoleh nilai **91,45**.

Apresiasi terhadap Program Pangan Aman Goes to Campus mendapat apresiasi dari Kemendikbud Ristek



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima Penghargaan Anugerah Mitra Kerja Sama Pendukung Program Dikti Ristek Kategori Lembaga Instansi Pemerintah. Penghargaan yang diterima merupakan hasil capaian program kolaborasi antara BPOM dan Kemendikbud Ristek melalui **Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)** yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

BPOM Raih Anugerah Diktiristek 2022 Atas Program Pangan Aman Goes To Campus

BPOM memperoleh penghargaan dalam Anugerah Diktiristek 2022 sebagai lembaga dengan Dukungan Peningkatan dan Pengawasan Kesehatan bagi Insan Pendidikan Tinggi, Kamis (15/12/2022). BPOM meraih kategori Anugerah Mitra Kerja Sama Pendukung Program Diktiristek atas Program Pangan Aman Goes To Campus (PAGC). PAGC merupakan kolaborasi BPOM dan Kemendikbud dalam kerangka menyukseskan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dit PMPU PO sebagai pemastus dan pelaksana dari Program Pangan Aman Goes to Campus yang sudah dimulai sejak tahun 2022

Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I Kategori Unit Kerja Pusat

AOC Terbaik Kategori Unit Kerja Pusat BPOM Tahun 2022

Dari Hasil Evaluasi Tahap II, didapatkan 3 tim Agen Perubahan dengan Action Plan Terbaik dari masing-masing kategori yaitu kategori Unit Kerja Pusat dan Balai/ Balai Besar POM, sebagai berikut :

Ranking	Kategori Unit Kerja Pusat	Kategori Balai Besar/Balai POM
Terbaik	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Balai Besar POM di Surabaya
Terbaik II	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Balai Besar POM di Banjarmasin
Terbaik III	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Balai Besar POM di Padang



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima penghargaan sebagai **Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I Tahun 2022** pada **Kategori Kinerja Unit Pusat**.

Penghargaan atas Partisipasi mendukung Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI 2022



Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapatkan penghargaan atas partisipasi pada kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI 2022 pada tanggal 14-21 Agustus 2022.

Apresiasi atas kontribusi dalam melakukan pendampingan terhadap UMK



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tanggal 17 Desember 2022 menerima penghargaan dari HIPMIKINDO atas kontribusinya dalam melakukan pendampingan terhadap UMK di Indonesia

Lolos seleksi Administrasi Proposal Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2022



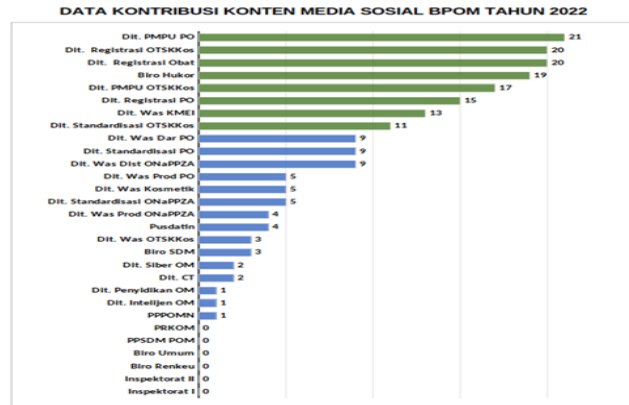
Tiga Program Strategis Dit PMPUPO berhasil lolos dalam seleksi administrasi Proposal Inovasi Pelayanan Publik 2022:

1. Istana Umkm
2. Paman Berani
3. Desa Paman.

Dukungan Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai Undang - undang Cipta Kerja

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengembangkan Aplikasi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (spirt.pom.go.id).

Apresiasi terhadap Kontribusi Konten Media Sosial BPOM Tahun 2022



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah berkontribusi terhadap konten Media Sosial BPOM tahun 2022 terkait meningkatkan komunikasi eksternal dan peningkatan informasi publik tentang makanan melalui media sosial kepada masyarakat.

Apresiasi terhadap IPP dan IPAK Tahun 2021



Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 memperoleh nilai 90,66 AA (Sangat Memuaskan)

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN							
NO	ASPEK/SUB ASPEK	Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(9)(2) x (10)			
1	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS	4100	6591	92	60%	54,89	AA (SANGAT MEMUASKAN)
1.1	Penciptaan Arsip	3200	2711	85	25%	21,18	A (MEMUASKAN)
1.2	Penggunaan Arsip	700	700	100	25%	25,00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
1.3	Pemeliharaan Arsip	1000	980	98	25%	24,50	AA (SANGAT MEMUASKAN)
1.4	Pertayuban Arsip	1200	1200	100	25%	25,00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	SUMBER DAYA KEARSIPAN	3700	3300	89	40%	35,67	BB (SANGAT BAIK)
2.1	SDM Kearsipan	1600	1300	81	50%	40,50	A (MEMUASKAN)
2.2	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2000	95	50%	47,51	AA (SANGAT MEMUASKAN)
TOTAL						90,66	AA (SANGAT MEMUASKAN)

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN

90.66
AA(Sangat Memuaskan)

Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha sangat Baik, salah satunya pengajuan SPPIRT melalui OSS yang dapat terbit dalam waktu 1 hari



Hasil Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (KPPB) dari BKPM

- PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pemberian penghargaan dan/sanksi atas kinerja anggaran K/L "mempertimbangkan" hasil penilaian percepatan pelaksanaan berusaha oleh BKPM:
 - K/L dengan nilai KPPB sangat baik "dapat dipertimbangkan" diberikan penghargaan
 - K/L dengan nilai KPPB kurang baik "dapat dipertimbangkan" dikenai sanksi
- Surat Deputi Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Nomor 305/A.7/B.3/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Hasil Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L TA 2021:

Sangat Baik	Baik	Kurang Baik
Kemen ESDM, Bapeten, Kemkes, BPOM, Kominfo, Kemtan, Kemenag, Parekrat, POLRI, dan KLHK	Kemenaker, Kemen PUPR, Kemenhub, Dikbud, dan Kemenperin.	-



Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Pencapaian predikat WBK merupakan salah satu wujud implementasi RB yang merupakan wujud capaian hasil pembangunan Zona Integritas pada 6 area perubahan yang telah dilakukan, terutama pada penguatan integritas dan menunjukkan dampak korelasi positif dari Indeks Persepsi RB dan Indeks Persepsi PIKKIR, serta inovasi pada sektor pelayanan publik, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN.

Apresiasi Deputi III terhadap Kinerja terbaik



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sebagai unit eselon II dengan kinerja terbaik tahun 2021

Dit PMPU dapat mempertahankan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Dit PMPUPO pada tahun 2022 telah dilakukan audit Surveilans ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu oleh PT Sucofindo dan pada 4 November 2022 direkomendasikan mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.



SURAT REKOMENDASI

Nomor: 6107/SERCO-X/OPS/2022



Menyatakan bahwa
Declare that

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia

telah memelihara sistem manajemen mutu yang memenuhi
has maintained quality management system that comply with

SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems–Requirements

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Bidang Pangan Olahan BPOM RI
*Empowerment of Communities and Processed Food Businesses in in the
framework of Drug and Food Control by the Indonesian Food and Drug Authority*

KODE SEKTOR/SECTOR CODE : 36



Surat ini diberikan berdasarkan hasil kegiatan Audit Surveilans bahwa organisasi dinyatakan dapat melanjutkan penggunaan sertifikat No. **QSC 01825**. Surat ini bukan sebagai pengganti sertifikat dan berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*This letter is given based on the results of the Surveillance Audit activities that the organization is declared to be able to continue the use of certificate No. **QSC 01825**. This letter is not a substitute for a certificate and is valid provided that the organization always meets the criteria as laid down by **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Thus this letter of recommendation is issued to be used properly.*

Jakarta, 04 November 2022

Budi Utomo
Pj. Kepala SBU Sertifikasi
& Ecoframework
PT SUCOFINDO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI yang dibentuk sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020.

VISI, MISI, DAN BUDAYA ORGANISASI

Visi

Visi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan” mengacu pada visi Badan POM di mana segenap jajaran bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia indonesia.

1. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Badan POM memiliki 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 (SE Menpan RB 20/2021) tentang *Implementasi Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara tertanggal 26 Agustus 2021, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengadopsi *core values* tersebut. Semua pegawai telah mengikuti sosialisasi dan mempelajari materi *core value* BERAKHLAK.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya antara lain:

1. **Ber-orientasi Pelayanan**, maksudnya; memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**, yaitu; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten**, panduan perilakunya ialah; meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis**, panduan perilakunya adalah; menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal**, panduan perilakunya adalah; memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif**, panduan perilakunya adalah; cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai pelaksanaan dari Perpres ditetapkannya Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terbentuk sejak Tahun 2018.

Namun seiring berjalannya waktu akan kebutuhan organisasi dilakukan penyederhanaan birokrasi dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif dan efisien, Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan telah diubah kembali menjadi Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dengan diterbitkannya Peraturan baru tersebut Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tetap menjadi 3 kelompok kerja.

Dalam menjalankan fungsinya Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dibantu oleh 3 Koordinator Kelompok Kerja dan dibantu Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Tiga Koordinator yang ada yaitu :

1. Koordinator Kelompok Substansi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah,
2. Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha, dan
3. Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Masyarakat Konsumen.

Masing-masing Koordinator dibantu oleh beberapa Sub koordinator seperti terlihat dalam Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO

Tugas Direktorat PMPUPO yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPUPO menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; dan
- Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

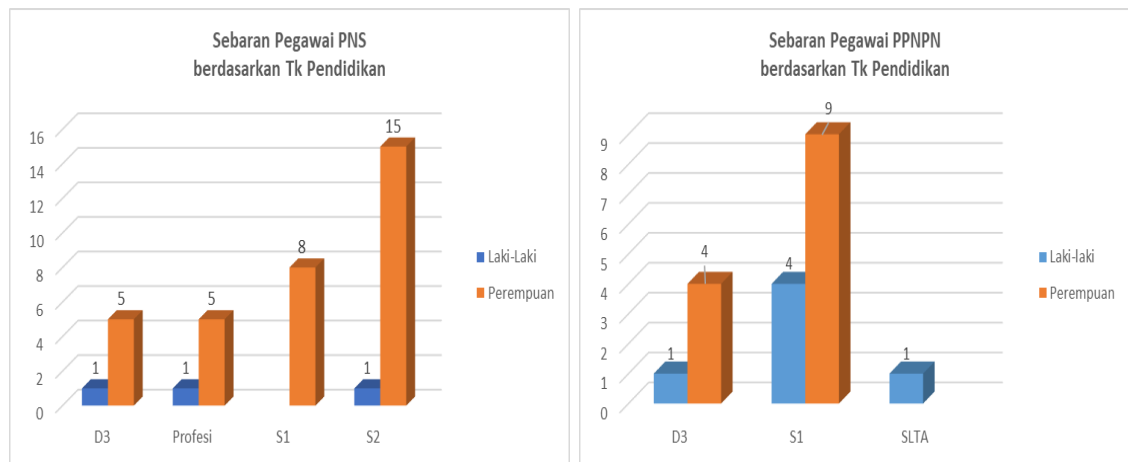
BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA

2.1 SUMBERDAYA MANUSIA

DATA PEGAWAI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung oleh tenaga PNS dan PPNPN. Pada awal tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima mutasi pegawai dari Biro Hukum dan Organisasi dan dari Loka POM di Kota Balikpapan masing-masing 1 orang. Berdasarkan pertimbangan pengembangan pegawai, pegawai yang mutasi dari Biro Hukum dan Organisasi yaitu Sandhyani Ellis M Damajanti, S.Si, Apt. Pegawai yang mutasi dari Loka POM di Kota Balikpapan yaitu Lisha Yuanita Sari, S.T.P.

Dengan adanya mutasi pegawai di awal tahun 2022, total jumlah pegawai pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menjadi 55 orang terdiri atas 36 orang PNS dan 19 orang pramubakti. Gambaran sebaran pegawai Direktorat PMPUPO berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022 terdapat pada Gambar 2.

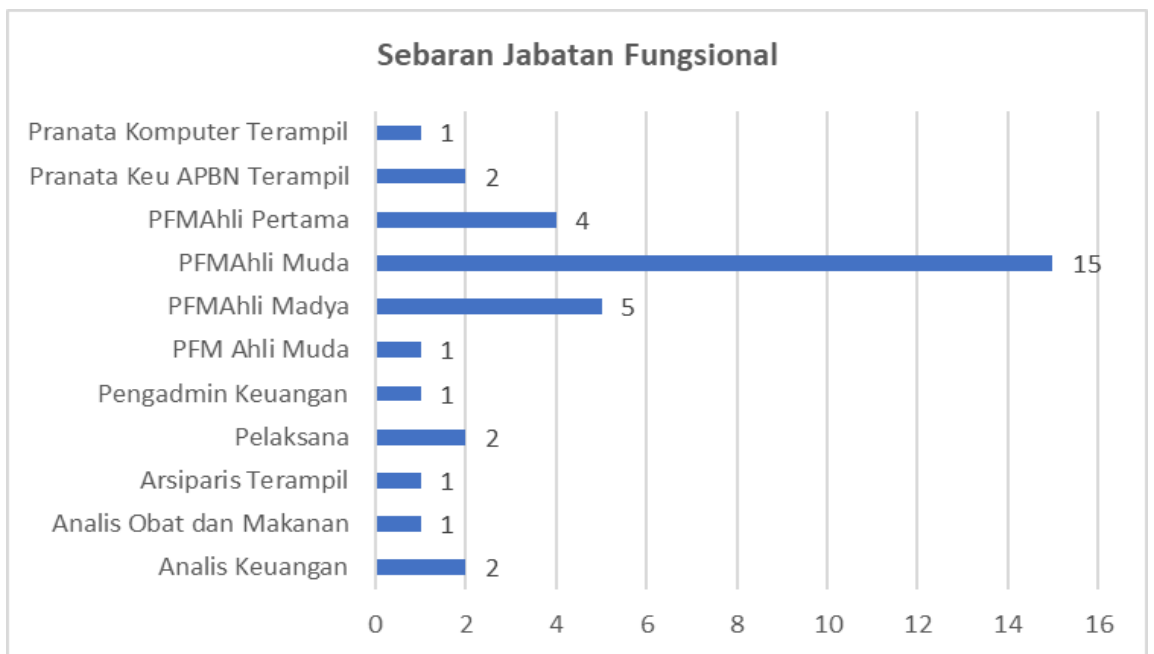
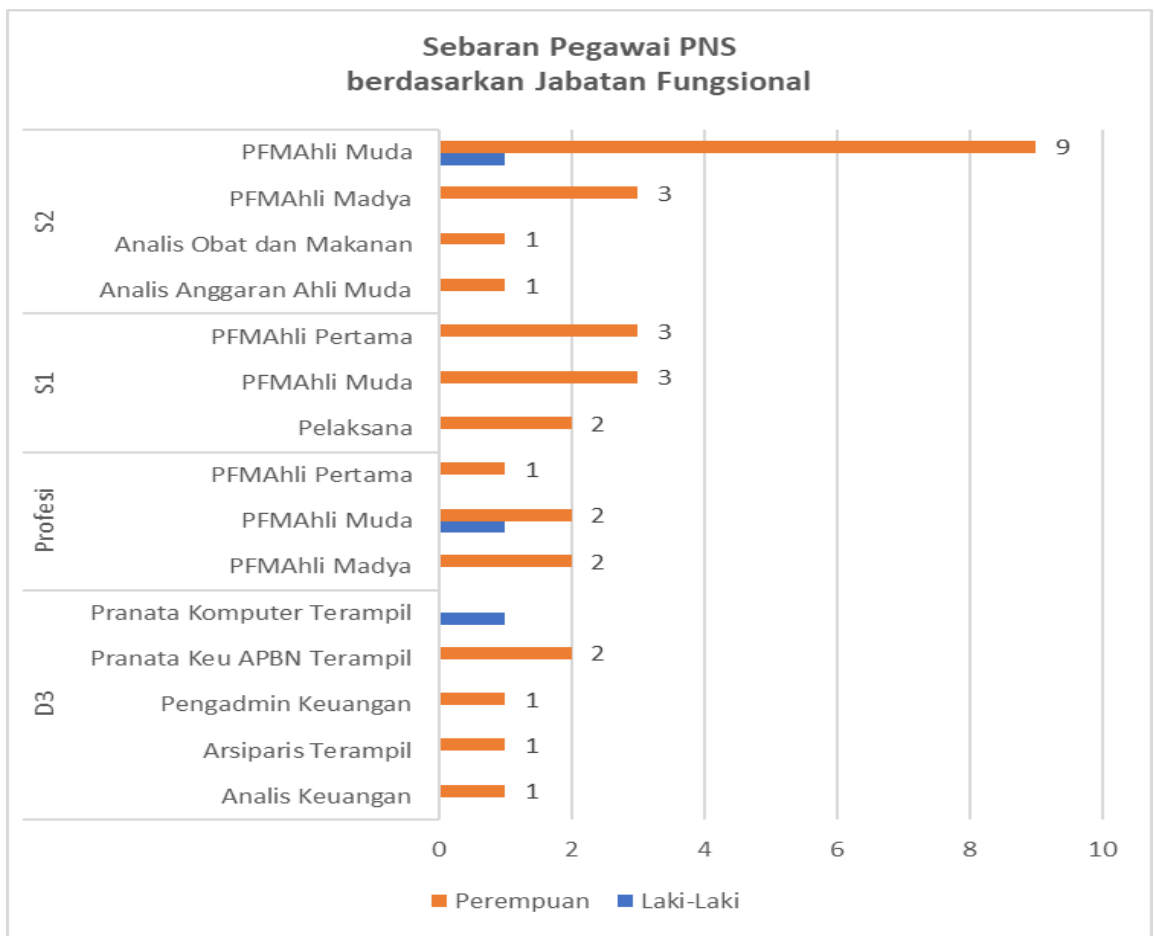


Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

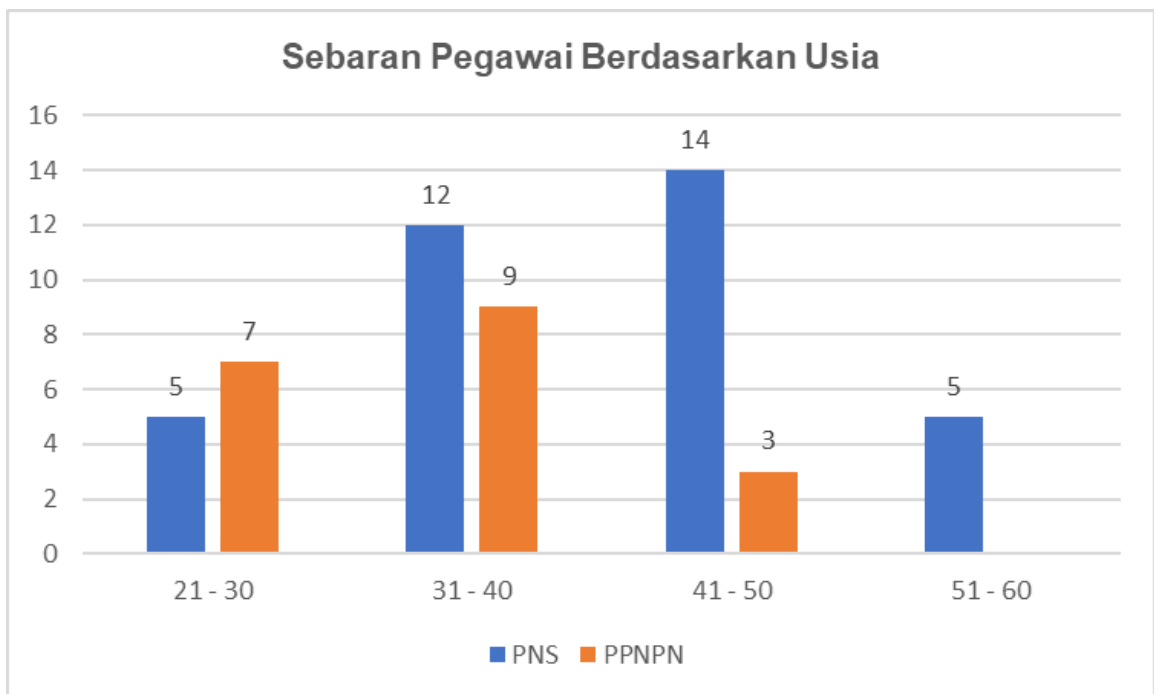
Dari total 36 orang pegawai PNS sebanyak 1 orang sebagai pejabat struktural yaitu Direktur, dan sebanyak 35 orang memegang jabatan fungsional. Sebaran jabatan fungsional pegawai PNS Tahun 2022 seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Nama Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
D3	Analisis Keuangan		1	1
	Arsiparis Terampil		1	1
	Pengadmin Keuangan		1	1
	Pranata Keu APBN Terampil		2	2
	Pranata Komputer Terampil	1		1
D3 Total		1	5	6
Profesi	PFM Ahli Madya		2	2
	PFM Ahli Muda	1	2	3
	PFM Ahli Pertama		1	1
Profesi Total		1	5	6
S1	Pelaksana		2	2
	PFM Ahli Muda		3	3
	PFM Ahli Pertama		3	3
S1 Total			8	8
S2	Direktur		1	1
	Analisis Anggaran Ahli Muda		1	1
	Analisis Obat dan Makanan		1	1
	PFM Ahli Madya		3	3
	PFM Ahli Muda	1	9	10
S2 Total		1	15	16
Total		3	33	36



Gambar 3 Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2022



Gambar 4 Sebaran Pegawai berdasarkan Usia

Profil pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 4. Pegawai PNS banyak berada pada kelompok usia produktif, paling banyak pada kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 14 orang. Pegawai PPNP juga terbanyak berada pada kelompok usia 31-40 tahun sejumlah 9 orang.

KEBUTUHAN PEGAWAI

Sejumlah pegawai yang ada masih terdapat gap jumlah pegawai dari yang dibutuhkan dengan pegawai yang existing tersedia. Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan jabatan, jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 62 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia. Masih terdapat kekurangan 26 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga Dit PMPUPO tahun 2022.

Gap kekurangan pegawai didukung dengan adanya tenaga pegawai PPNP sebanyak 19 orang. Namun jumlah pegawai PPNP yang ada belum memenuhi jumlah kebutuhan pegawai di tahun 2022.

Tabel 2 Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK Tahun 2022

NO	Nama Jabatan	Jumlah		
		ABK	Besetzung	GAP
1	PFM Utama	0	0	0
2	Direktur	1	1	0
3	PFM Madya Koordinator	3	3	0
4	PFM Madya Sub Koordinator	2	2	0
5	PFM Madya	7	0	7
6	PFM Muda Sub Koordinator	6	6	0
7	PFM Muda	12	10	2
8	PFM Pertama	13	4	9
9	Sub Koordinator TOP/ Analis Anggaran Muda	1	1	0
10	Perencana Pertama	1	0	1
13	Analis Kebijakan Pertama	1	0	1
14	Analis Kepegawaian Pelaksana	1	0	1
15	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1	0	1
21	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	0
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	0	1
23	Pranata Komputer Pertama	1	0	1
24	Arsiparis Pelaksana	1	0	1
25	Arsiparis Terampil	1	1	0
26	Arsiparis Mahir	1	0	1
30	Pranata Keuangan APBN	4	2	2
31	Analis Keuangan APBN	1	0	1
32	Analis Keuangan APBN Ahli Muda	0	0	0
33	Pengelola BMN (JFU)	1	0	1
35	Sekretaris (JFU)	1	0	1
36	Pengadmin Umum (JFU)	0	2	-2
37	Analis Obat dan Makanan	0	1	-1
38	Pelaksana (JFU)	0	2	-2
	Jumlah	62	36	26

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Pada tahun 2022 terdapat 3 orang pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar melanjutkan S1 dan S2, yaitu Ratih Tri Andayani, A.MF, Nurita Lastrri Tampubolon, S.T.P. dan Puji Lestari, S.T.P. Kesempatan tugas belajar ini diberikan bagi pegawai yang berminat, terutama yang belum mencapai tingkat pendidikan S1.

Dalam pemenuhan kompetensi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi masing-masing pegawai, memperhatikan hasil penilaian asesmen kompetensi yang telah dilakukan oleh PPSDM BPOM. Untuk pemenuhan kompetensi, Direktorat terus berupaya mendorong pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara daring melalui aplikasi IDEAS maupun mengikuti kompetensi lainnya.

Beberapa pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi telah disediakan untuk dapat diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:

- Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat serta Ruang *Podcast*;
- Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas;
- Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya dapat dilihat pada Tabel 13.

2.3 ANGGARAN

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp 14.850.000.000,- Namun pada bulan Oktober 2022 karena adanya *refocusing* anggaran, maka pagu Direktorat berkurang menjadi Rp. 12.385.556.000,- Pada akhir tahun, total realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2022 adalah sebesar Rp12.384.419.198,- atau sebesar 99,99%. Realisasi anggaran dari masing-masing output sebagai berikut :

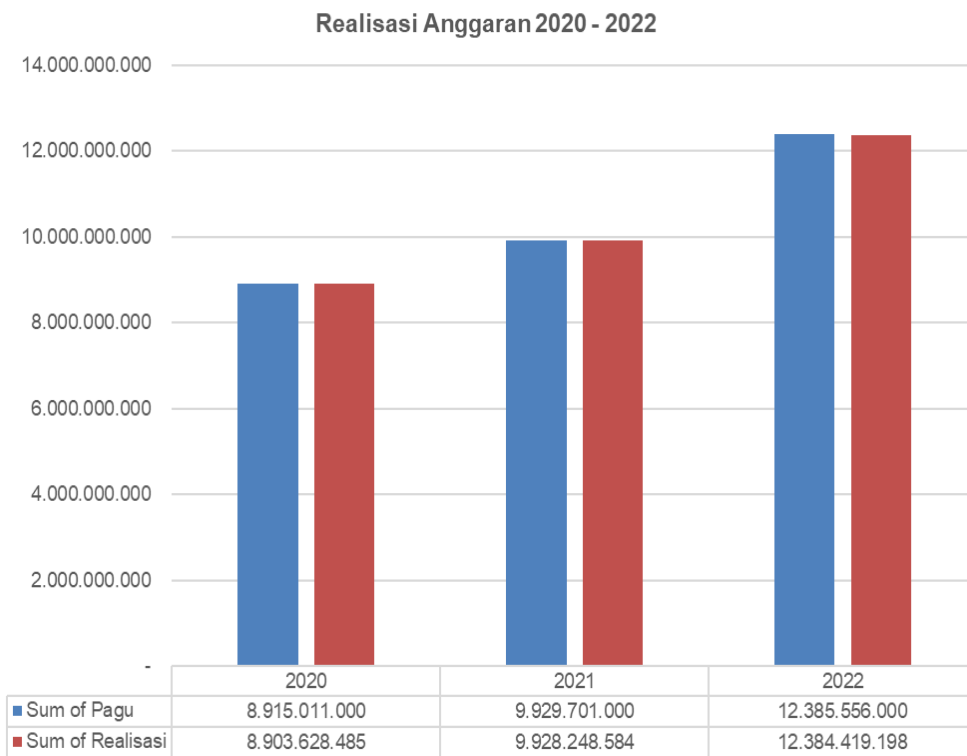
Tabel 3 Realisasi anggaran per output

NO	KEGIATAN	OUTPUT	VOLUME			REALISASI ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	200 Kader	205 kader	102,5%	1,712,844,000	1,712,835,242	100%
2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan	240 orang	299 orang	120%	3,385,227,000	3,385,213,770	100%
3	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Prov/ kab/ kota)	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35 Kab/ Kota	37 Kab/ Kota	105%	3,120,535,000	3,119,461,864	99,97%
4	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Prov/ kab/ kota)	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240 Kab/ Kota	240 Kab/ Kota	100%	4,166,950,000	4,166,908,322	100%

Tiap tahun realisasi anggaran Dit PMPUPO sekitar 99%, seperti tampak pada Tabel 5 berikut.

Tabel 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2023

Tahun	Pagu	Realisasi	% Realisasi
2020	8.915.011.000	8.903.628.485	99,87
2021	9.929.701.000	9.928.248.584	99,99
2022	12.385.556.000	12.384.419.198	99,99



Gambar 5 Realisasi Anggaran 2020-2022

Rincian realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan

Rincian		Pagu	Total Realisasi	% Realisasi
4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	1.712.844.000	1.712.835.242	100,00%
	51 Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	15.499.000	15.498.660	100,00%
1	A Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	15.499.000	15.498.660	100,00%
	52 Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	1.120.506.000	1.120.501.482	100,00%
2	A Bimbingan Teknis kader keamanan pangan	757.404.000	757.401.046	100,00%
3	B KIE Kader Keamanan Pangan	71.100.000	71.100.000	100,00%
4	C Sinergi Peningkatan kapasitas komunitas melalui dasa wisma engagement	292.002.000	292.000.436	100,00%
	53 Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	576.839.000	576.835.100	100,00%
5	A Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	272.561.000	272.559.100	100,00%
6	B Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) obat dan makanan	213.948.000	213.948.000	100,00%
7	C Strategi Komunikasi Keamanan pangan	46.250.000	46.250.000	100,00%
8	D Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi PMPU	44.080.000	44.078.000	100,00%
4132.BDC.002	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada	3.385.227.000	3.385.213.770	100,00%
	51 sosialisasi keamanan pangan bagi umkm	1.160.788.000	1.160.783.163	100,00%
9	A Pemberdayaan masyarakat melalui KIE obat dan makanan	367.610.000	367.610.000	100,00%
10	B Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	165.045.000	165.041.908	100,00%
11	C Pelatihan fasilitator berbasis kompetensi	201.665.000	201.664.458	100,00%
12	D Sosialisasi Keamanan Pangan oleh Fasilitator	120.230.000	120.229.958	100,00%
13	E Pengembangan aplikasi istana UMKM	122.655.000	122.654.300	100,00%
14	F Training CPPOB untuk UMKM	183.583.000	183.582.539	100,00%
	52 Pendampingan UMKM Pangan	772.901.000	772.899.101	100,00%
15	A Perkuatan lintas sektor dalam pendampingan UMKM	133.831.000	133.829.601	100,00%
16	B Program orang tua angkat UMK pangan olahan	1.500.000	1.500.000	100,00%
17	C Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACPP di UMKM	637.570.000	637.569.500	100,00%
	53 Bimbingan Teknis UMKM Ritel Pangan	496.240.000	496.239.005	100,00%
18	A Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Peredaran	496.240.000	496.239.005	100,00%
	54 Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui kegiatan pangan aman goes to campus	955.298.000	955.292.501	100,00%
19	A Advokasi dan webinar launching program pangan aman goes to campus	525.113.000	525.110.729	100,00%
20	B Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan TK.I	99.564.000	99.563.500	100,00%
21	C Bimtek dan kerja lapang mahasiswa terlatih sebagai fasilitator UMKM	249.101.000	249.099.392	100,00%
22	D Monitoring dan Evaluasi Program	81.520.000	81.518.880	100,00%
4132.FBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan	3.120.535.000	3.119.461.864	99,97%
	52 Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	2.947.374.000	2.946.302.384	99,96%
23	A Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPP-I	994.014.000	994.006.534	100,00%
24	B Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau ind	791.977.000	790.916.407	99,87%
25	C Monitoring dan evaluasi implementasi pengawasan keamanan pangan di kabupaten/kota	495.486.000	495.485.563	100,00%
26	D Implementasi RB	563.288.000	563.284.880	100,00%
27	G Dukungan Administrasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	102.609.000	102.609.000	100,00%
	53 Peningkatan Kompetensi tenaga PKP di pemda	173.161.000	173.159.480	100,00%
28	B Pengelolaan satker	54.998.000	54.997.480	100,00%
29	C Pengelolaan TIK	118.163.000	118.162.000	100,00%

4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan		4.166.950.000	4.166.908.322	100,00%
	51	Koordinasi Lintas Sektor	1.762.160.000	1.762.139.646	100,00%
30	A	Workshop Keamanan Pangan Nasional	86.527.000	86.525.710	100,00%
31	B	Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan	75.492.000	75.492.000	100,00%
32	C	Koordinasi Lintas Sektor PJAS	307.661.000	307.656.737	100,00%
33	D	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan	325.704.000	325.695.154	100,00%
34	E	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Pangan Aman	596.632.000	596.626.595	100,00%
37	G	Percepatan Penanganan Covid-19	370.144.000	370.143.450	100,00%
	52	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	774.920.000	774.914.748	100,00%
35	A	Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan	443.931.000	443.928.107	100,00%
36	B	Implementasi Kegiatan CPE (Asean Health Cluster 4)	10.000.000	10.000.000	100,00%
37	C	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan desa	73.286.000	73.284.750	100,00%
38	D	Pengembangan pedoman dan materi kegiatan pasar	108.646.000	108.644.970	100,00%
39	E	Pengembangan kompetensi ASN	139.057.000	139.056.921	100,00%
	53	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	722.722.000	722.718.331	100,00%
40	A	Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	36.130.000	36.129.700	100,00%
41	B	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	215.079.000	215.078.600	100,00%
42	C	Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman	5.175.000	5.175.000	100,00%
43	D	Monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi PMPU	281.675.000	281.672.531	100,00%
44	E	Pemberdayaan masyarakat melalui KIE obat dan makanan	184.663.000	184.662.500	100,00%
	54	Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB	907.148.000	907.135.597	100,00%
45	A	Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	276.154.000	276.149.884	100,00%
46	B	Lomba Desa Pangan Aman	333.166.000	333.158.726	100,00%
47	C	Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	297.828.000	297.826.987	100,00%
TOTAL			12.385.556.000	12.384.419.198	99,99%

BAB III HASIL KEGIATAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan tahun 2022 oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengikuti peta strategis yang terdapat pada Dokumen Reviu Rencana Strategis Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020 - 2024. Peta strategis level 2 Direktorat PMPU PO, seperti pada Gambar 6 berikut :



Gambar 6 Peta Strategis Direktorat PMPUPO Tahun 2020-2024

Terdapat 11 Sasaran Kinerja Direktorat yang mendukung Sasaran Program Deputy 3. Masing-masing sasaran memiliki indikator kegiatan. Target masing-masing indikator kegiatan dapat dicapai melalui kontribusi penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2022 ditetapkan oleh Direktur pada 7 Januari 2022. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja serta Target capaian indikator 2022 dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 2022

Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
SK1. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku Usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK sesuai dengan pedoman	70	Persen
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87.5	-
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTTP	35	Persen
	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	Kab/Kota
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	Persen
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	240	Orang
	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3.81	-
Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	Unit
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	500	orang
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93.56	-
Meningkatkan peran aktif UPT BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	85	Persen
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan	Indeks RB Dit PMPUPO	93	-

Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	80	-
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit. PMPUPO yang optimal	2.25	-
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	92	-

Berikut pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2022:

Tabel 7 Capaian IKK Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket	
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	1.1	Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan sesuai pedoman	70	70,89	101,27	
	1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Dit PMPUPO	87,5	91	104,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	2.1	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	102,5	107,89	
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap	3.1	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35	37	105,71	

keamanan, mutu, dan gizi makanan	3.2	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	240	100,00	
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang makanan	4.1	Jumlah PKP/Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan	240	288	120,00	
	4.2	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	3,81	4,68	122,83	
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang makanan	5.1	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300	305	101,67	
	5.2	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56	94,23	100,72	
Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan	6	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	350	108,70	
Meningkatnya peran aktif UPT BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	7	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	85	85,29	100,34	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	8	Indeks RB Dit. PMPUPO	93	91,64	98,54	
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal	9	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	86,5	86,73	100,27	
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	10	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPUPO	2,26	2,75	121,68	

Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Akuntabel	11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	92	100	108,70	
--	----	---	----	-----	--------	--

Keterangan:

Cukup
Baik

Dari 15 Indikator kinerja, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target (98,55%) dengan kategori cukup yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Masih perlu upaya perbaikan sedikit lagi agar dapat memperoleh nilai sesuai target.

SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap

3.1.1 Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman

A, PENGEMBANGAN APLIKASI ISTANA UMKM

Istana UMKM merupakan sebuah media online yang dirintis oleh BPOM sebagai bentuk upaya kolaborasi, sinergisme dan inovasi diantara Kementerian/Lembaga, BUMN dan *e-commerce* terkait pangan olahan, obat tradisional dan kosmetika, termasuk akademisi, masyarakat dan pemerhati.

Tujuan dari dikembangkannya Istana UMKM ini adalah Mengembangkan subsite Istana UMKM agar menjadi sarana edukasi melalui kemudahan akses informasi yang dibutuhkan pelaku UMKM maupun Fasilitator Keamanan Pangan; sebagai sarana komunikasi antara regulator, industri pangan, akademisi dan konsumen; sarana mempromosikan budaya keamanan pangan, obat tradisional dan kosmetika; dan sarana untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

Output yang diharapkan adalah tingginya jumlah pengunjung (*user*) yang memanfaatkan informasi yang disediakan dalam subsite ini. Hal ini menandakan kebermanfaatan subsite ini sebagai *one stop information* bagi UMKM. Dampak dari kegiatan ini, UMK Pangan dan Fasilitator Nasional mampu mengakses informasi terkini seputar Keamanan Pangan dan memanfaatkan Istana UMKM untuk meningkatkan kapasitas.

Pada tahun 2022 pengembangan Istana UMKM dilakukan meliputi:

- Optimalisasi *E-Learning* bagi pelaku usaha dan fasilitator keamanan pangan (Inovasi 2022).

- Branding program pendampingan UMK melalui fitur katalog profil UMK yang telah didampingi
- Penyediaan fitur input database UMK dan fasilitator BPOM
- Fitur yang mengakomodir sistem sertifikasi pengakuan fasilitator

B. Monev Pemberdayaan PKP dari UPT BPOM Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACPP di UMKM

Pasca tenaga PKP dari UPT BPOM lulus pelatihan PKP Pertama atau PKP Muda, diharapkan dapat diberdayakan oleh UPT BPOM masing-masing dalam melaksanakan Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

Tujuan Monev Pemberdayaan ini adalah untuk menjaga kompetensi petugas UPT BPOM yang telah dilatih dan sekaligus dokumen pendampingan yang dilakukan dapat menjadi portofolio yang akan digunakan pada saat petugas tersebut mengajukan diri mengikuti asesmen kompetensi PKP. Pemberdayaan tenaga PKP antara lain dapat sebagai Penyuluh ke pelaku usaha pangan olahan, Pendamping saat fasilitasi penerapan CPPOB di sarana produksi UMKM binaan ataupun sebagai petugas coaching e-sertifikasi dan atau e-registrasi sehingga dapat terus mengawal pendampingan kepada UMKM pangan olahan binaannya hingga mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).

Target yang ditetapkan adalah pemberdayaan tenaga PKP yang telah lulus pelatihan dalam pelaksanaan Program Pendampingan Penerapan CPPOB Bagi UMKM Pangan Olahan sebesar 70 % dari total peserta PKP yang lulus. Capaian yang dihasilkan sebanyak 77 orang tenaga PKP telah diberdayakan dari 108 peserta yang dilatih, atau sebesar 71%. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 70%, maka capaian terhadap target sebesar 101,4 %. Hal ini disebabkan karena sebagian tenaga PKP UPT BPOM bertugas di bagian Infokom yang memang tidak memiliki tugas dan fungsi mendampingi di sarana produksi UMKM pangan olahan secara langsung, namun kompetensi PKP ini juga diperlukan pada saat mereka melakukan edukasi/bimbingan teknis ke UMKM Pangan Olahan.



Gambar 7 Pelaksanaan Pendampingan CPPOB di UMKM Pangan Olahan

C. ADVOKASI DAN WEBINAR LAUNCHING PROGRAM PANGAN AMAN GOES TO CAMPUS

Dalam rangka membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan pada komunitas pendidikan di Perguruan Tinggi, Badan POM membuat terobosan baru melalui Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC). Program PAGC bersinergi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ditjen Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti).



Gambar 8 Launching program Pangan Aman Goes to Campus oleh Kepala Badan POM

Program ini merupakan aksi nyata Badan POM dalam partisipasinya menyiapkan lulusan Perguruan Tinggi yang siap bekerja di dunia nyata sekaligus berkontribusi dalam pengawasan keamanan pangan. Program PAGC-MBKM ini juga telah dilakukan bersama dengan 13 Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu:

- (1) Institut Teknologi Bandung
- (2) Universitas Indonesia
- (3) Universitas Gajah Mada
- (4) Institut Pertanian Bogor
- (5) Universitas Padjajaran
- 6) Universitas Brawijaya

- (7) Universitas Airlangga
- (8) Universitas Diponegoro
- (9) Universitas Sumatera Utara
- (10) Universitas Andalas
- (11) Universitas Hasanudin,
- (12) Universitas Bhayangkara Surabaya
- (13) Universitas Sahid

Pada 14 April 2022 telah dilakukan penandatanganan MoU Program PAGC-MBKM bersama 13 Perguruan Tinggi sekaligus diluncurkan yang bertujuan untuk membangun komitmen seluruh komponen terkait agar bersama-sama memberikan komitmen dan partisipasinya dalam menyukseskan program PAGC-MBKM.

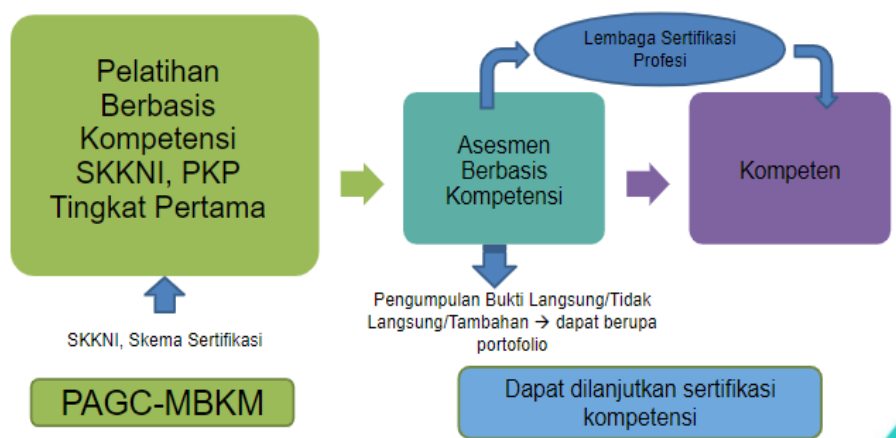
D. BIMBINGAN TEKNIS DAN KERJA LAPANG MAHASISWA TERLATIH SEBAGAI FASILITATOR UMKM

Salah satu tantangan besar dalam peningkatan daya saing UMKM, khususnya UMK pangan, adalah keterbatasan pada berbagai aspek. Hambatan yang kerap dihadapi UMK Pangan untuk menyediakan produk berkualitas terkait dengan (1) metode dalam memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, (2) sumber daya manusia, (3) peralatan, (4) modal, dan (5) sarana prasarana.

Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka BPOM menyelenggarakan Pangan Aman Goes to Campus dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mencetak SDM Kompeten sekaligus berperan sebagai Fasilitator Keamanan Pangan untuk pendampingan UMKM. Mahasiswa terpilih akan diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang sesuai dengan SKKNI bidang keamanan pangan untuk Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama. Selanjutnya mahasiswa yang sudah dilatih menjadi PKP Pertama akan diberikan pembekalan teknis pendampingan UMKM serta kegiatan magang di UMK Pangan Olahan.

Program ini didesain sedemikian rupa, diantaranya yaitu adanya kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang disinkronkan dengan capaian pembelajaran

di kampus dalam bentuk SKS; materi pembelajaran yang selaras dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya mentor kegiatan yang berasal dari BPOM, UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program Pangan Aman *Goes to Campus* membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* sebagai Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menjadi pemimpin masa depan yang unggul yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.



Gambar 9 Konsep Pangan Aman Goes to Campus

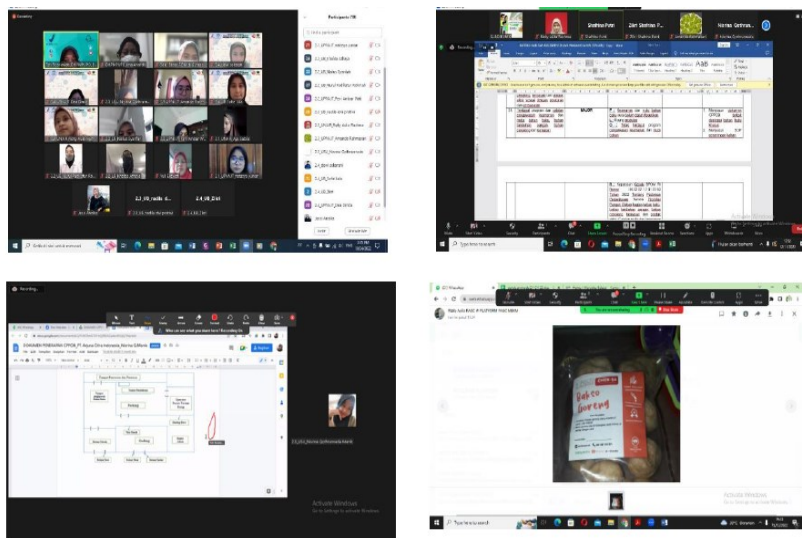
Kegiatan Bimbingan teknis telah dilakukan terhadap 125 mahasiswa pada batch 1 dan 94 mahasiswa pada batch 2 program PAGC Tahun 2022. Seluruh mahasiswa mengerjakan penugasan pada kegiatan matrikulasi dan pelatihan PKP pertama dengan baik. Konsep Program Pangan Aman *Goes to Campus* dapat dilihat pada Gambar 9.

E. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Program Pangan Aman *Goes to Campus* didesain secara komprehensif dan objektif. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan dengan masing-masing tahapan dilakukan mentoring, evaluasi dan penilaian. Mentoring kepada mahasiswa dilakukan

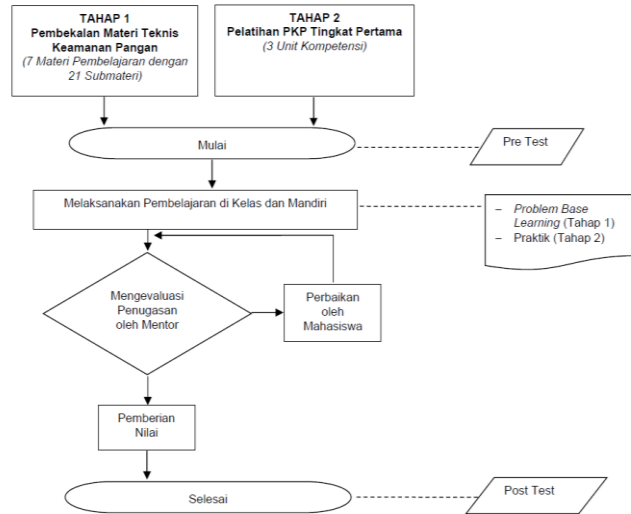
terhadap seluruh aktivitas pada tahapan program. Mentor pada program ini berasal BPOM dan UPT BPOM (Balai dan Loka POM). Mentor dapat berperan sebagai *Expert/Narasumber* yang akan memberikan perkuliahan di dalam kelas dan sebagai Mentor yang bertugas untuk memberikan pendalaman materi, penjelasan penugasan, konsultasi, mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa/penugasan, dan pemberian penilaian melalui *coaching, counselling, dan consultation*.

Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran saat pembekalan dan pelatihan serta selama aktivitas pendampingan saat magang/praktik kerja di UMK Pangan Olahan. Evaluasi dilakukan terhadap hasil praktik dan hasil laporan. Evaluasi juga dilakukan pada platform Kampus Merdeka oleh masing-masing Mentor. Hasil evaluasi disampaikan secara tertulis melalui laporan dan secara langsung saat praktik dan mentoring (Gambar 10). Mekanisme monitoring dan evaluasi mahasiswa yang mengikuti program PAGC ini dapat dilihat pada Gambar 10.

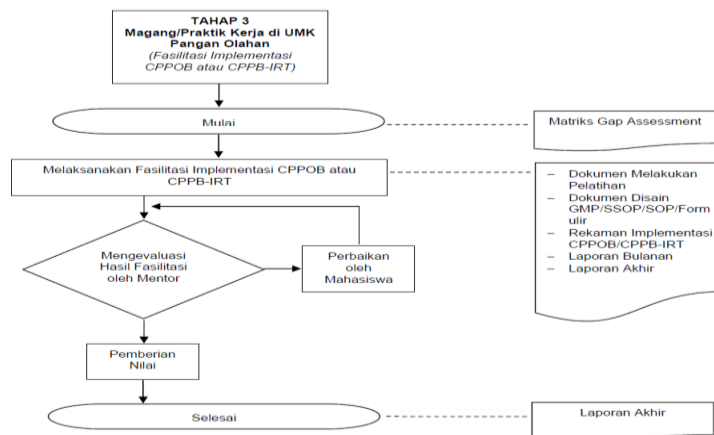


Gambar 10 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mahasiswa program PAGC secara Daring

Mekanisme Evaluasi dan Mentoring Mahasiswa



Mekanisme Evaluasi dan Mentoring Mahasiswa (Lanjutan)



Gambar 11 Mekanisme monitoring dan evaluasi mahasiswa pelaksana PAGC

3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

TRAINING Good Manufacturing Practices (GMP)/CPPOB UNTUK UMKM

Sejalan dengan Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan Makmur, perlu didukung dengan berbagai upaya segenap komponen bangsa untuk

mewujudkannya. Salah satunya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten sebagai salah satu motor penggerak utama untuk mewujudkan visi tersebut. Amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM, bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha, sejalan dengan Misi BPOM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar mengingat jumlahnya yang sangat besar. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro. Jumlah UMK saat ini sebanyak 64.149.328 atau 99,92% dari seluruh usaha di Indonesia (KUKM, 2021). Peran UMKM pangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi negara memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan peran penting dalam ekonomi rakyat sebagai penggerak ekonomi keluarga.

Program Training CPPOB merupakan salah satu program “*new initiative*” bertujuan untuk meningkatkan kerjasama BPOM dengan pemangku kepentingan sebagai implementasi sinergisme antar pilar pengawasan keamanan pangan, memberikan edukasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT dan CPPOB serta meningkatkan daya saing UMK pangan olahan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Melalui Program *Training* Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMK Pangan Olahan terkait CPPOB sehingga mampu menerapkan CPPOB di sarana produksinya, dan siap mendapatkan Nomor Izin Edar atau memenuhi Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terhadap produk yang dihasilkan.

Pada tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melakukan Program *Training* CPPOB yaitu Bimtek CPPOB dan PKP, sebagai berikut:

- Bimbingan TEknis CPPOB Regional Barat dilaksanakan pada tanggal 22,23,26 dan 27 September 2022 yang diikuti oleh 514 peserta UMK Pangan Olahan. Hasil

survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap peserta menunjukkan nilai 97,45 (Sangat Puas).

- Bimbingan Teknis CPPOB Regional Tengah dan Timur dilaksanakan pada tanggal 27, 28, 31 Oktober dan 1 November 2022 yang diikuti oleh 463 peserta UMK Pangan Olahan. Dari 463 peserta yang terdaftar, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat ketentuan untuk bisa mendapatkan sertifikat sebanyak 204 orang. Hasil survey Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) menunjukkan nilai 96,32 (sangat puas), sehingga dapat diartikan peserta menganggap kegiatan ini memberikan dampak yang bermanfaat.
- Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Regional Barat dilaksanakan pada tanggal 6-7 Oktober 2022, diikuti oleh 644 orang pelaku usaha peserta Bimtek PKP. Peserta yang lulus dengan nilai posttest minimal 60 adalah sebanyak 339 peserta. Hasil survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap peserta Bimtek PKP menunjukkan nilai 96,3 yang artinya peserta sangat puas mengikuti kegiatan Bimtek PKP.
- Bimtek PKP Regional Tengah dan Timur dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2022 yang diikuti oleh 326 peserta UMK Pangan Olahan. Peserta yang lulus dengan nilai post test minimal 60 adalah sebanyak 270 peserta. Hasil survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap peserta Bimtek PKP menunjukkan nilai 97,86 yang artinya peserta sangat puas mengikuti kegiatan Bimtek PKP.



Gambar 12 Training CPPOB : Bimtek CPPOB dan PKP

SK 2. Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap Keamanan, Mutu, dan Gizi Makanan

3.2.1 Persentase Kab/Kota yang menerapkan Peraturan Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga Pangan Rumah Tangga (IRTP)

MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN/KOTA

Sejak tahun 2018 telah dilakukan kajian Implementasi SPP-IRT, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, Kepala BPOM menyatakan bahwa produksi IRTP yang akan diedarkan harus mendapatkan SPP-IRT dari Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, IRTP yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di Dinkes Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM RI tentang SPP-IRT. Untuk mendapatkan SPP-IRT, IRTP harus menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk IRTP dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP yang dilakukan oleh tenaga *District Food Inspector* (DFI) yang ada di Dinkes Kabupaten/Kota setempat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023), PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan, mengakibatkan beberapa hal dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT) perlu disesuaikan.

Kajian Implementasi SPP-IRT perlu dilakukan penyesuaian karena alur penerbitan SPP-IRT berubah antara lain dengan dilakukannya pengawasan pemenuhan komitmen setelah terbitnya SPP-IRT. Berdasarkan terbitnya berbagai peraturan yang baru dan juga perubahan alur pendaftaran SPP-IRT melalui OSS RBA, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan akan melakukan kajian terhadap implementasi persyaratan IRTP setelah pendaftaran SPP-IRT didaftarkan secara nasional melalui OSS RBA, baik pada pihak Pemda Kabupaten/Kota cq. Dinkes Kabupaten/Kota maupun pihak IRTP sebagai pelaksana. Kajian ini juga bermaksud mencari faktor penyebab yang mempengaruhi tidak terpenuhinya persyaratan IRTP tersebut di suatu kabupaten/kota jika memang ada.

Tujuan Kajian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran kabupaten/kota dalam menerbitkan SPP-IRT melalui aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi OSS RBA berdasarkan PP 5 Tahun 2021, Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerbitan SPP-IRT dan Pengawasan Pemenuhan Komitmen oleh pemerintah Daerah/Kab Kota cq Dinas Kesehatan dan Dinas PM-PTSP sesuai Peraturan terbaru.

Kriteria Utama penilaian adalah:

- a. Tidak menerima pendaftaran SPP-IRT secara manual/semua melalui OSS RBA,
- b. Telah melakukan verifikasi Data SPP-IRT terbit di aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id).
- c. Telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka pemenuhan komitmen,
- d. Telah melakukan pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan komitmen, IRTP disebut memenuhi komitmen jika SPP-IRT jika hasil pemeriksaan B-C atau level I-II,
- e. Sertifikat penyuluhan diberikan sesuai standar (hasil evaluasi minimal 60 dan nomor standar),
- f. Sarana produksi IRTP diperiksa sesuai standar.

Sedangkan Kriteria Tambahan yaitu bahwa :

- Semua materi utama PKP diberikan,
 - Semua petugas DFI yang melakukan pemeriksaan sarana memiliki sertifikat,
 - Ada laporan/data base penyelenggaraan penyuluhan PKP,
 - Semua petugas PKP yang melakukan pemeriksaan sarana memiliki sertifikat.
1. Populasi dan Sampel Dinkes Kabupaten/Kota dipilih secara terencana (*purposing sample*) di 6 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Maluku, dan Papua) berjumlah sebanyak 104 Kabupaten/Kota.
 2. Mekanisme Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden Pengumpulan data dilakukan di Dinkes Kabupaten/Kota dan DPM PTSP dengan cara pengisian kuesioner survei untuk mengetahui penerapan pedoman SPP-IRT di Dinas Kesehatan, dan kuesioner survei untuk mengetahui penerapan pedoman SPP-IRT di DPM PTSP. Pada kajian ini terdapat 100 Kabupaten/Kota yang akan menjadi sampel kajian, yaitu Kabupaten/Kota yang telah mendapat intervensi kegiatan asistensi regulasi kepada Pemerintah Daerah tahun 2022.

Profil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerbitkan SPP-IRT sesuai ketentuan yang berlaku sampai November 2022. Sampai dengan November 2022, dari 100 Kab/Kota yang telah mengisi kuesioner, terdapat 37 Kabupaten/Kota yang berkriteria baik.

3.2.2 Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)

A. PENGEMBANGAN MATERI PROMOSI KEAMANAN PANGAN PROGRAM PJAS

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu. Hal ini

penting dilakukan mengingat peredaran PJAS tidak hanya diakses secara langsung di lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa, tetapi juga dapat diakses secara online melalui *e-commerce*. Masih maraknya kasus keamanan pangan, maka perlu dilakukan klasifikasi dan pemberian informasi yang berimbang agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang tepat, yaitu melalui:

1. Penyediaan Materi

Pada tahun 2022 telah dilakukan pembuatan materi edukasi, antara lain terkait kasus-kasus keamanan pangan, serta updated presentasi terkait Informasi Nilai Gizi.

2. Maintenance Subsite Klub POMPI

Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS) merupakan salah satu program prioritas nasional yang target pencapaiannya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Salah satu tools untuk mensukseskan program tersebut adalah adanya subsite klubpompi.pom.go.id yang digunakan sebagai *media sharing* informasi dan berbagai materi terkait keamanan pangan, khususnya untuk komunitas sekolah. Klub Pompi mulai dikembangkan sejak tahun 2008.

Sedangkan untuk Subsite Klubpompi (klubpompi.pom.go.id) dikembangkan sejak tahun 2013. Dalam perjalanannya, Klubpompi telah mengalami banyak perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Saat ini klubpompi mengalami perkembangan pada fitur survey dan flipbook (*e-book*) yang dikembangkan pada Tahun 2020.

Dengan hadirnya fitur survey ini, maka pengguna (*user*) klubpompi dapat memberikan penilaian terhadap keandalan subsite klubpompi dalam memberikan pelayanan informasi kepada user. Selain itu, dengan hadirnya fitur *flipbook (e-book)*, maka pengguna (*user*) diberikan sajian membaca buku elektronik layaknya membaca buku dengan buku di tangan.

Pada bulan Mei 2023 subsite klubpompi tidak dapat diakses, hal ini diduga dikarenakan adanya virus yang menyerang subsite, telah dilakukan updating keamanan untuk menanggulangi hal tersebut, mengingat subsite digunakan oleh

anak-anak sekolah sebagai media pembelajaran dan pemberdayaan anak usia sekolah terkait keamanan pangan.

B. PENGEMBANGAN PEDOMAN DAN MATERI KEGIATAN DESA PANGAN AMAN

Capaian program Desa Pangan Aman sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah desa yang sudah diintervensi sebanyak 6,5% dari total 83.880 desa. Berdasarkan data tersebut, capaian intervensi program ini masih rendah. Untuk meningkatkan cakupan intervensi dan mempercepat pelaksanaan implementasi keamanan pangan diperlukan strategi melalui peningkatan *awareness* Program melalui publikasi atau promosi secara masif dan periodik agar masyarakat dan stakeholder mengetahui program ini.

Kegiatan peningkatan *awareness* program melalui publikasi atau promosi bertujuan untuk meningkatkan cakupan wilayah yang diintervensi keamanan pangan dan mengoptimalkan pelaksanaan implementasi keamanan pangan. Pada kegiatan ini menggunakan dua *platform*, yaitu Instagram dan Facebook @pmpupangan.bpom

Pelaksanaan peningkatan *awareness* program antara lain:

1. Membuat *agenda setting* yang meliputi:
 - a. Agenda publikasi program
 - b. Agenda publikasi kegiatan
2. *Social Media Management*
 - a. Menganalisa dan membuat strategi konten sosial media.
 - b. Membuat *copywriting* konten.
 - c. Melakukan update konten pada sosial media.
 - d. Mengunggah konten pada YouTube
 - e. Memantau interaksi pada sosial media.
 - f. Pembuatan Konten Visual
 - g. Membuat laporan media sosial tiap bulan.
3. Manajemen Iklan Facebook/Instagram
4. Pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil publikasi program Germas Sapa. Laporan berisi analisis dampak kegiatan publikasi ini.

Fokus audiens adalah para stakeholder yang terhimpun dalam Desa Pangan Aman, termasuk pembuat kebijakan, pelaku usaha, anak sekolah, hingga masyarakat umum, sehingga konten-konten yang dikembangkan yaitu terkait dan menjadi preferensi yang diperlukan oleh audiens serta terkait isu-isu kekinian.

Program ini telah memposting 99 *post Instagram Feed*, dengan konten yang menjadi Top Post pada periode ini adalah konten Germas Sapa, dengan perolehan Reach sebanyak 132.000 orang. Perolehan tersebut sangat tinggi dikarenakan konten tersebut dijadikan sebagai iklan Instagram.



Gambar 13 post Instagram Feed

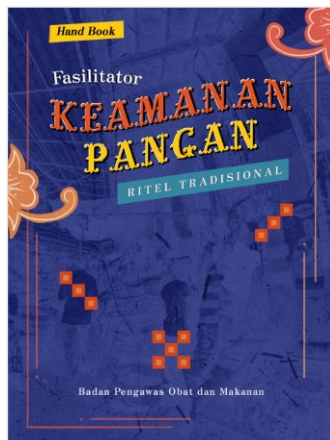
C. PENGEMBANGAN PEDOMAN DAN MATERI KEGIATAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS (PPABK)

Pengembangan pedoman dan materi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang telah dilakukan, yaitu:

Penyusunan Handbook Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Traadisional

Program Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional merupakan salah satu program untuk mensosialisasi dan mengedukasi keamanan pangan, regulasi dan standar pangan olahan kepada komunitas ritel tradisional dengan melatih anggota asosiasi/organisasi/Lembaga menjadi Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional, sehingga dapat memperluas edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha di daerah seluruh Indonesia. Terkait

hal itu, BPOM juga selalu mengembangkan kemampuan dan kapabilitas dari Fasilitator Keamanan Pangan yang merupakan perpanjangan tangan BPOM dalam mengedukasi pedagang untuk menerapkan standar dan peraturan yang berlaku di ritel. Salah satu cara mengembangkan dan meningkatkan kompetensi fasilitator adalah dengan penyusunan *Handbook* Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional, sehingga fasilitator dapat mendampingi pelaku usaha ritel dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di ritel pangan.



Gambar 14 Buku saku (Handbook) Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional

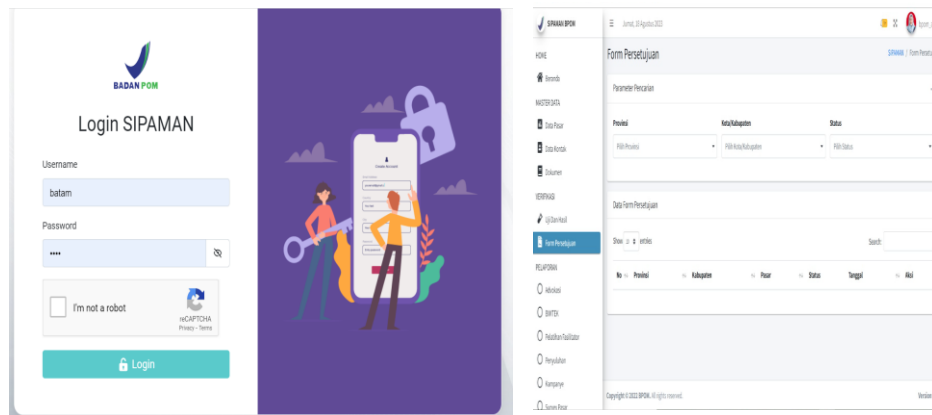
Pengembangan Sistem Informasi Pasar Aman (SIPaman)

Namun demikian, berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian sampel pangan yang beredar di pasaran, masih sering ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya, seperti: Boraks, Formalin, Kuning Metanil, Rhodamin B, Auramin, Sudan B, Amaranth, dan lain-lain. Bahan berbahaya tersebut adalah bahan kimia yang penggunaannya bukan untuk pangan. Bahan kimia tersebut mudah diperoleh, dijual secara bebas dan harganya relatif murah sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh produsen atau pengelola pangan yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi produk pangannya demi memperoleh keuntungan yang besar.

Pemerintah terus berusaha mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Sehingga pada tahun 2013 telah dibangun aplikasi Sistem Informasi Pangan Aman (SIPAMAN) untuk

mendukung proses pengawasan dan pembinaan pasar tradisional di seluruh Indonesia sehingga tercipta pasar pangan aman.

Sejak tahun 2013-2021, aplikasi SIPAMAN dikembangkan menggunakan *platform* ASPX dan bahasa pemrograman *Visual Basic*. Sehubungan dengan perkembangan teknologi, maka dilakukan pengembangan terhadap *platform* dan bahasa pemrograman yang digunakan. Sehingga pada tahun 2022 ini, SIPAMAN dikembangkan menggunakan *platform* CodeIgniter dan bahasa pemrograman PHP.



Gambar 15 Tampilan Front End dan Back End Sipaman Tahun 2022

D. WORKSHOP KEAMANAN PANGAN NASIONAL

Program Pro-Prioritas Nasional didesain untuk menumbuhkan *partnership* dalam pengembangan program keamanan pangan dan replikasi model desa, pasar dan sekolah secara berkelanjutan. Program yang dilaksanakan di Pusat (BPOM c.q. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) yaitu perkuatan lintas sektor, pengembangan materi keamanan pangan dan monitoring dan evaluasi.. Kegiatan yang dilakukan di daerah (Balai Besar/Balai POM) antara lain advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan, Pemberian Paket Edukasi dan Informasi Keamanan Pangan, serta Pengawasan. Program ini dilaksanakan secara koordinatif yang melibatkan lintas sektor terkait. Strategi dan tahapan kegiatan yang dirancang ini memerlukan komitmen dan dukungan semua lintas sektor terkait.

Program Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Terpadu di daerah perlu pengelolaan kegiatan yang terarah dan sistematis. Untuk itu, BPOM melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan akan melaksanakan Workshop Intensifikasi dan Konsolidasi Program Prioritas Nasional (Desa, Pasar, Sekolah) bagi petugas Balai Besar/Balai POM serta Loka POM Terkait.

Tujuan kegiatan Workshop Nasional Program Intervensi Keamanan Pangan Terpadu adalah untuk :

1. Pembekalan kepada petugas Balai Besar/Balai POM dalam pengelolaan Program Pembinaan Implementasi Intervensi Keamanan Pangan Terpadu di daerah.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka sinergisme kegiatan Program Pro-PN.

Pemerintah daerah menjadi kunci utama suksesnya program keterpaduan ini. Pemerintah Daerah telah diberikan peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT SADAR PANGAN AMAN

Untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah, Badan POM telah menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat yaitu Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman sejak tahun 2014.

Program ini diintegrasikan melalui kegiatan Germas SAPA, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga program tersebut merupakan Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024.

Program ini adalah bentuk intervensi keamanan pangan kepada komunitas masyarakat, pelaku usaha dan sekolah agar menjadi mandiri dalam hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel yang ada di desa dan sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat yang paham dan cerdas dalam melakukan edukasi keamanan pangan. Untuk keterpaduan pelaksanaan intervensi keamanan pangan tersebut, pada tahun ini Badan POM melakukan advokasi keamanan pangan kepada pemangku kebijakan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia.

Agar pelaksanaan Germas Sapa di daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu perlu dilaksanakan pertemuan teknis dengan pelaksana kegiatan Germas Sapa di daerah. Selain itu juga perlu dilakukan *sharing experience* dari beberapa daerah yang memiliki *success story* pada pelaksanaan program Germas Sapa. Pertemuan ini mengusung tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pertemuan Teknis Germas Sapa bertujuan untuk:

- melakukan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan Germas Sapa kepada pelaksana teknis di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
- memberikan informasi kepada daerah terkait contoh-contoh pelaksanaan Germas Sapa yang sudah berhasil dilakukan oleh beberapa daerah.

Pertemuan Teknis Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2022 diikuti oleh 1.577 peserta: Kementerian/Lembaga yang berasal dari Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, PDTT, dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian KUKM, BKKBN, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, Dinas Pendidikan, Pimpinan

Pemerintah Desa beserta perangkat desa dan UPT BPOM dari seluruh provinsi di Indonesia.

Narasumber pertemuan teknis Germas Sapa adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III I, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Kesehatan, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Kepala SDN Model Kota Malang, Jawa Timur, Kader Keamanan Pangan Desa 2021 Kel. Agrowisata, Riau. Dengan Penanggap adalah Kepala Nagari Bayua, Kab. Agam, Sumatera Barat, Kepala Pasar Nyanggelan, Kota Denpasar, Bali, Kepala SDN Krapyak Wetan, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta, Kader Keamanan Pangan Desa Panggunharjo, Kab. Bantul, Yogyakarta, Koordinator Lapangan Satgas Pangan Bandar Lampung, MTSN 1 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.



Gambar 16 Pertemuan Teknis Germas Sapa bersama Ibu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

F. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sangat diperlukan dukungan dari lintas sektor, salah satunya dukungan sumber

daya manusia dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 sebagai upaya untuk :

1. Berdiskusi terkait kendala dan rencana tindak lanjut serta masukan terhadap Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
2. Pemantapan hubungan dengan lintas sektor
3. Penguatan sumber daya manusia pengelola keamanan pangan di OPD
4. Peningkatan potensi program ini secara berkesinambungan dengan melakukan replikasi ke pasar-pasar lainnya.

Kegiatan FGD pada tahun 2022 dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Bali dengan peserta berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Pangan Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bappeda, Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan / PD Pasar Kabupaten / Kota Target.

Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah wajib mewujudkan pasar yang sehat, aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas.
2. Perlunya kolaborasi Penta Helix (Pemerintah (Balai Besar POM dan OPD terkait), akademisi, asosiasi, media sosial dan produsen pangan tingkat provinsi dan Kabupaten / Kota dan lintas provinsi) untuk memperluas jangkauan pasar yang diintervensi dan meningkatkan keamanan pangan
3. Perlunya penguatan serta aktivasi komunitas-komunitas yang ada di pasar (pengelola pasar, pedagang, pembeli, paguyuban pedagang dan lainnya) untuk turut berperan aktif dalam peningkatan Literasi Pasar, memastikan pangan yang dijual aman dari bahan berbahaya serta sesuai dengan cara peredaran pangan olahan dan pangan segar yang baik.
4. Perlunya penguatan serta aktivasi komunitas-komunitas yang ada di luar pasar (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, perkumpulan dan lainnya) untuk turut berperan aktif dalam

- mendorong pangan yang dijual di pasar dalam kondisi yang aman, melalui sosialisasi mengenai keamanan pangan ke masyarakat konsumen maupun ke pedagang, mengingat peran PKK, ormas dan lainnya yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
5. Melibatkan Desa Adat dalam menjalankan sosialisasi keamanan pangan untuk mendukung program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
 6. Perlunya pengawasan dari hulu ke hilir dengan pembentukan dan perkuatan Jejaring lintas sektor sehingga temuan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan baik di tingkat produsen/ UMKM/ IRTP maupun di pasar dapat ditelusuri sumber / pemasoknya serta ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi sampai menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 7. Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang kuat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar baik pasar swalayan, pasar rakyat (pasar daerah dan pasar desa) maupun online termasuk didalamnya pengawasan terhadap penjual bahan kimia berbahaya.
 8. Kabupaten/Kota yang belum memiliki tim terpadu keamanan pangan agar membentuk tim koordinasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 tahun 2018. Tim ini dapat memanfaatkan tim yang telah ada dengan mengoptimalkan fungsinya (tidak perlu membentuk tim baru).
 9. Penguatan kelembagaan Pasar dilakukan melalui :
 - a. Pembinaan SDM: Pembentukan Kader Keamanan Pangan, Pemberdayaan Komunitas pasar (Konsumen maupun pedagang)
 - b. Management pasar, peningkatan sarana dan prasarana pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat, Pasar SNI, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
 10. Penguatan regulasi tentang keamanan pangan di daerah dapat melalui pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau Perda.
 11. Pemerintah Kabupaten / Kota perlu melakukan replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, salah satunya dengan melakukan sampling dan pengujian pangan yang beredar di Pasar.
 12. Adanya dukungan dari Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, atau OPD yang membidangi perencanaan terhadap program Keamanan Pangan

yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam hal pengawasan Bahan Berbahaya melalui rancangan RPJMD.

13. Pemberian *reward* dari Pemerintah Daerah untuk pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya antara lain stikerisasi kepada pedagang dan sanksi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku kepada pedagang pasar yang produknya mengandung bahan berbahaya.
14. Perlu pembagian wewenang yang jelas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengawasan peredaran bahan berbahaya.
15. Perlunya gerakan masyarakat secara bersama-sama, massive, sistematis, dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi pangan aman di pasar termasuk jalur distribusinya.

G. Koordinasi Lintas Sektor PJAS

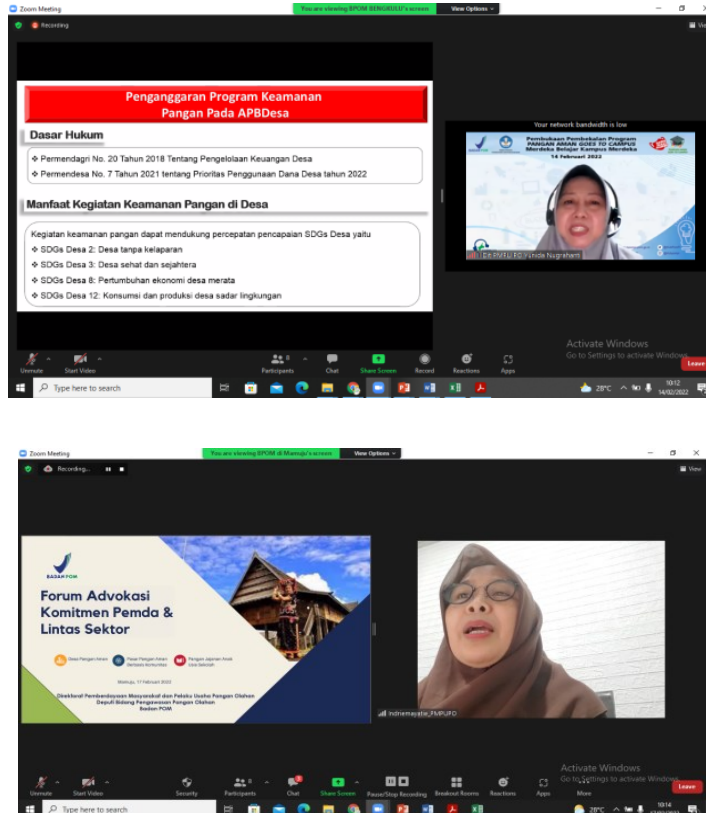
Pada tahun 2022, BPOM turut serta dalam peningkatan kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja melalui program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Program PJAS merupakan Proyek Prioritas Nasional Kab/ Kota yang diintervensi Keamanan Pangan PJAS tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan RPJMN 2020-2024.

Program Intervensi Keamanan PJAS bertujuan untuk 1) Mengawal PJAS aman, bermutu, dan bernutrisi; dan 2) Memberdayakan Komunitas Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua, dan Pedagang) agar mampu dan mandiri melindungi diri dan keluarganya dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM terus melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Tingkat Pusat dan Daerah (UPT BPOM serta Pemerintah Daerah). Di Tingkat Pusat, Badan POM telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait Kolaborasi Program PJAS dengan RAN PIJAR (Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja). BPOM berpartisipasi sebagai Tim RAN PIJAR (BPOM sudah masuk ke dalam SK yang ditetapkan) dan BPOM mendukung lima strategi RAN PIJAR dengan pro aktif mengupdate data capaian aksi nyata PJAS

pada matriks RAN PIJAR serta berupaya hadir dalam pertemuan sebagai bentuk sosialisasi program PJAS ke lintas sektor terkait.

Selanjutnya Dit PMPUPO juga melakukan koordinasi dengan 30 BB/BPOM beserta Pemerintah Daerah (84 Kabupaten/Kota) dalam kegiatan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS. Koordinasi ini diharapkan akan meningkatkan komitmen lintas sektor di daerah dalam melaksanakan pemberdayaan komunitas sekolah serta mereplikasi program keamanan PJAS.



Gambar 17 Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Program Pangan Jajanan

Koordinasi Lintas Sektor PJAS di tingkat daerah dihadiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota serta OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari koordinasi ini dilakukan penandatanganan komitmen program intervensi keamanan PJAS dan rekomendasi program intervensi keamanan PJAS yang akan dilakukan bersama selama 1 (satu) tahun ke depan.

H. IMPLEMENTASI KEGIATAN Asean Health Cluster 4 (CPE)

Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) merupakan pertemuan tingkat pejabat senior ASEAN (eselon 1) bidang kesehatan di bawah koordinasi *ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)* yang bertujuan untuk membahas implementasi beberapa agenda penting yang dimandatkan oleh AHMM serta menerima laporan dan memberikan arahan kepada tiap-tiap Koordinator dan *focal point ASEAN Health Cluster*.

Terdapat 4 (empat) cluster dalam SOMHD, yaitu:

- a. *Cluster 1: Promoting health lifestyle*
- b. *Cluster 2: Responding to all hazards and emerging threat*
- c. *Cluster 3: Strengthening health system*
- d. *Cluster 4: Ensuring food safety*

Pada Tahun 2022 telah dilakukan beberapa pertemuan guna membahas rencana kerja serta capaian AHC4, yaitu antara lain:

- 18-19 Januari 2022: *virtual meeting-Planning meeting for the work programme 2021-2025 of the ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety*
- 5 Juli 2022: *Pre meeting* pembahasan AHC4 *Work Plan 2022 - 2025*
- 20-21 Juli 2022: *AHC4 Workplan 2022 - 2025*
- 10-11 Agustus 2022: *The 6th meeting of health cluster 4: Ensuring Food Safety*

Keikutsertaan dalam program tersebut merupakan salah satu upaya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk terus berupaya meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terkait pentingnya keamanan pangan baik di level nasional maupun level global.

AHC4 Work Plan 2022 - 2025					
Strategy 2: Minimize capacity gaps among national food control systems through capacity building C. To provide necessary mechanisms and capacity building activities to minimize capacity gaps among the national food control systems	c.2. By 2025, AMS with identified national policy and programme indicate readiness to implement their policy and programme on CPE on Food Safety	8. Finalisation of the ASEAN Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety	• Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety is endorsed	Indonesia	SOM-AMAF ACCSQ-PPFWG
		Facilitation on the implementation of the ASEAN Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety	•	Indonesia	SOM-AMAF ACCSQ-PPFWG
		Identify common food safety issues and target groups for CPE Program on Food Safety while incorporating the findings of the assessment of the Consumer Participation and Empowerment Program on Food Safety in AMS and identify capacity building needs for Planning, Developing, Executing and Evaluation CPE Program on Food Safety in AMS	• ASEAN situational report on common food safety issues and target groups and the needs of capacity building in Planning, Developing, Executing and Evaluation CPE Program on Food Safety in AMSs are completed by AMS and reported.	Indonesia	SOM-AMAF ACCSQ-PPFWG
		10. Conduct Regional Workshop on CPE Program on Food Safety in AMS	• Report/proceeding of the workshop with recommendations on common food safety issues and target groups for CPE Program in AMSs is developed and circulated.	Indonesia	SOM-AMAF ACCSQ-PPFWG
		11. Conduct training on Planning, Developing, Executing and Evaluation CPE Program on Food Safety	• Targeted AMS participants participated fully in the training (targeted by end of 2023)	Indonesia	SOM-AMAF ACCSQ-PPFWG
	12. Conduct survey/evaluation on CPE program on Food Safety in each AMS	• Evaluation of the planned, developed and implemented CPE Program in AMS is conducted and reported.	Indonesia	SOM-AMAF ACCSQ-PPFWG	

Gambar 18 Work Plan AHC4 2022 – 2025

I. LOMBA SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas sekolah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada Sekolah yang telah mengimplementasikan program keamanan pangan dalam mewujudkan sekolah dengan PJAS Aman. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi komunitas sekolah dalam upaya mewujudkan program keamanan pangan di sekolah
2. Memberikan motivasi kepada Sekolah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman.

Tahapan penilaian lomba sekolah sebagai berikut:

- a. Verifikasi Dokumen Usulan Sekolah dengan PJAS Aman
- b. Wawancara
- c. Verifikasi Lapangan Usulan Sekolah dengan PJAS Aman

Kriteria penilaian lomba sekolah dengan PJAS Aman adalah

- a) Keberhasilan Program Keamanan Pangan Sekolah, meliputi penilaian:
 - Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Keamanan Pangan Sekolah
 - Tim Keamanan Pangan di Sekolah
 - Aktivitas Kader Keamanan Pangan Sekolah secara mandiri
 - Implementasi program keberlanjutan

- b) Inovasi dan Prestasi Sekolah, meliputi penilaian:
 - Inovasi sekolah/kader terkait keamanan pangan yang diselenggarakan secara mandiri
 - Keikutsertaan/prestasi sekolah pada kegiatan terkait keamanan pangan

Pada Lomba Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2022, total Balai yang berpartisipasi pada kegiatan ini sebanyak 28 Balai Besar/ Balai POM, dengan rincian sekolah sebagai berikut:

- Total Sekolah Dasar yang berpartisipasi 21 sekolah dari 20 provinsi
- Total Sekolah Menengah Pertama yang berpartisipasi 20 dari 19 provinsi
- Total Sekolah Menengah Atas yang berpartisipasi 7 dari 7 provinsi.

Tim juri dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman adalah dari internal Dit PMPUPO dan perwakilan Kementerian/Lembaga dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan (KPPPA); Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kementerian Kesehatan); Direktorat Pembinaan SD (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi); serta Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (Kementerian Agama).

Berdasarkan hasil penilaian juri tanggal 27 Juni 2022 pemenang Lomba Sekolah dengan PJAS Aman dengan nilai tertinggi sebagai berikut:

- a) Kategori SD:
 - SDIT Istiqamah Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
 - SDI Al Akbar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
 - SD Negeri Kyai Mojo Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
- b) Kategori SMP:
 - SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Metro, Lampung
 - SMP Negeri 22 Malang, Kota Malang, Jawa Timur
 - SMP Negeri 1 Muara Bungo, Kab. Bungo, Jambi
- c) Kategori SMA:
 - SMA N 1 Kejuruan Muda, Kab. Tamiang, Aceh
 - SMA Negeri 5 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Pemenang Lomba Sekolah Dengan PJAS Aman



Gambar 19 Pemenang Lomba Sekolah dengan PJAS Aman

J. LOMBA DESA PANGAN AMAN

Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di Kedeputian 3, setiap tahun Badan POM memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah/Desa yang telah mendukung program pemberdayaan masyarakat

melalui penyelenggaraan Lomba Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Desa/Kelurahan serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Desa Pangan Aman melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Terdapat beberapa tim juri yang berasal dari beberapa kementerian, yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkoparekraf, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pertanian, BKKBN, dan Badan POM.

Kegiatan penilaian Lomba Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Penilaian Dokumen

Dilakukan pada tanggal 19 - 20 Januari 2022

Terdapat 33 profil desa yang berasal dari 33 provinsi untuk dinilai oleh juri. Semua dokumen dinilai berdasarkan poin penilaian yang telah ditetapkan, yaitu terkait keberhasilan program Desa Pangan Aman, Inovasi dan inisiasi program keamanan pangan di desa, dan rencana keberlanjutan program keamanan pangan di desa.

2. Seleksi Wawancara

Dilakukan pada tanggal 2 - 3 Februari 2022.

Tim juri/verifikator pusat melakukan wawancara terhadap 10 besar desa dengan nilai tertinggi secara daring. Wawancara akan dilakukan kepada Kepala Desa/Lurah yang didampingi oleh perwakilan dari Tim KPD/KKPD. Wawancara ini bertujuan untuk menggali terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program desa pangan aman. Wawancara juga dilakukan untuk menggali pengalaman dan inovasi yang dilakukan di desa tersebut dalam melaksanakan program keamanan pangan.

Berikut 10 besar nominator Lomba Desa Pangan Aman dari hasil penilaian dokumen yang mengikuti tahap wawancara seperti pada Tabel 8 di bawah ini. Desa/Kelurahan dengan nilai wawancara 7 besar tertinggi akan lolos ke tahap verifikasi lapangan.

Tabel 8 Nominator Lomba Desa Pangan Aman

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Desa
1	Riau	Kota Pekanbaru	Kelurahan Agrowisata
2	Sumatera Barat	Kab. Agam	Desa Nagari Bayua
3	DI. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Kelurahan Sukoreno
4	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	Desa Sungai Duri
5	Jawa Timur	Kab. Ngawi	Desa Brubuh
6	Kalimantan Selatan	Kab Tanah Laut	Desa Sungai Rasau
7	Sulawesi Selatan	Kab Soppeng	Desa Timusu
8	Jawa Tengah	Kab. Tegal	Desa Tuwel
9	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	Kelurahan Ampah Kota
10	Sulawesi Barat	Kab Majene	Desa Buttu Baruga

3. Verifikasi Lapangan, dilakukan pada 24 Maret sampai dengan tanggal 12 April 2022 terhadap 7 nominator terbaik yaitu:
 1. Desa Nagari Bayua, Kab. Agam, Sumatera Barat
 2. Kelurahan Sukoreno, Kab. Kulon Progo, DIY
 3. Desa Sungai Rasau, Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan
 4. Desa Timusu, Kab Soppeng, Sulawesi Selatan
 5. Kelurahan Agrowisata, Kota Pekanbaru, Riau
 6. Desa Brubuh, Kab. Ngawi, Jawa Timur
 7. Desa Sungai Duri, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat

Dilakukan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan dan implementasi keamanan pangan di komunitas (Ibu Rumah Tangga, Warung, IRTP, PKL, dan Sekolah) serta verifikasi terhadap beberapa dokumen yang perlu dikonfirmasi berdasarkan hasil penilaian dokumen dan wawancara.

Nilai tertinggi akan didapatkan apabila Desa menerapkan prinsip keamanan pangan dengan baik. Pemerintah Daerah sangat mendukung dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini, terlihat dari kehadiran bupati, wakil bupati, camat, kepala dinas, dsb dalam kegiatan penilaian maupun kegiatan lain terkait GKPD di Desa.

Berdasarkan hasil penilaian didapatkan pemenang lomba Desa Pangan Aman Tahun 2022, adalah:

1. Desa Nagari Bayua, Kab. Agam, Sumatera Barat
2. Desa Timusu, Kab Soppeng, Sulawesi Selatan
3. Desa Brubuh, Kab. Ngawi, Jawa Timur



Gambar 20 Pemenang lomba Desa Pangan Aman

K. LOMBA PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Pasar Rakyat didefinisikan sebagai tempat usaha yang ditata, di bangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan/atau BUMD dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMK, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Berdasarkan hasil Survei Profil Pasar Tahun 2019, jumlah pasar rakyat di Indonesia dengan jumlah 15.567 pasar dari seluruh pasar di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019), maka pasar rakyat merupakan tempat strategis untuk berbagai tujuan.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat dan untuk menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di pasar, Badan POM RI menyelenggarakan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, yang direvitalisasi menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi Pemerintah Daerah dan komunitas pasar untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
2. Memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman terutama dalam masa pandemi covid-19.

Tahapan Kegiatan ini antara lain :

1. Pengiriman profile Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
2. BB/BPO mengirimkan 1 (satu) profil Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk diusulkan sebagai nominator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tingkat nasional. Pasar yang dapat diusulkan adalah pasar yang sudah diintervensi oleh BB/BPOM atau pasar yang melakukan replikasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara mandiri (tanpa diintervensi oleh Badan POM) dan belum pernah menjadi pemenang Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebelumnya.
3. Seleksi peserta lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas oleh Juri

4. Tim Juri/Verifikator pusat melakukan penilaian terhadap seluruh pasar unggulan yang dikirimkan oleh BB/BPOM berdasar kriteria yang ditetapkan dalam Panduan Kegiatan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk selanjutnya ditetapkan Nominator yang akan dikunjungi oleh tim juri untuk dilakukan tahapan verifikasi lapang.
5. Verifikasi Lapangan Tingkat Nasional
6. Tim Juri/Verifikator pusat melakukan verifikasi ke pasar terpilih yang telah ditetapkan sebagai calon pemenang Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tingkat nasional. Tim Juri/Verifikator di tiap propinsi melakukan verifikasi terhadap Pasar sesuai dengan indikator penilaian.
7. Penentuan Pemenang Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
8. Tim Juri / Verifikator menentukan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tingkat Nasional berdasarkan hasil verifikasi lapangan

Indikator penilaian terhadap program Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas antara lain:

1. Dukungan Pemerintah daerah / Lembaga Penanggung Jawab
2. Implementasi Penerapan Protokol kesehatan dimasa Covid-19
3. Hasil Monev Sampling dan Uji Pangan Tidak Memenuhi Syarat
4. Hasil Survey Pasar (Sarana prasarana, Kebersihan Pasar, Perilaku Pedagang) untuk Pasar
5. Temuan dan tindak lanjut pelanggaran
6. Kemandirian Pasar Melalui Jumlah inovasi yang dilakukan
7. Peran Komunitas dalam Program PPAB

Tim juri yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan unit BPOM selain Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM.

Dari seluruh peserta yang berasal dari 30 (tiga puluh) pasar yang berasal dari 30 Provinsi di Indonesia telah dinilai oleh tim juri dan diperoleh 6 besar peserta yang berasal dari Pasar Nyanggelan (Denpasar), Pasar Mayestik (Jakarta), Pasar Raya Bumi Pangeran (Banjarmasin), Pasar Sangatta (Samarinda), Pasar Niten Yogyakarta

dan Pasar Pariaman (Padang). Setelah dilakukan verifikasi lapang, maka ditetapkan 3 juara sesuai urutan sebagai berikut:

1. Pasar Nyanggelan, Denpasar, Bali
2. Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
3. Pasar Niten, Kab. Bantul, DIY



Gambar 21 Penerima Penghargaan Juara 1 Pasar Nyanggelan Denpasar, Bali oleh Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, S. Sos., M. Si.



Gambar 22 Penerima Penghargaan Juara 2 Pasar Mayestik Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta oleh Direktur Utama Perumda Jaya Bapak Tri Prasetyo



Gambar 23 Penerima Penghargaan Juara 3 Pasar Niten Kab. Bantul DIY, Kabid Sarana Perdagangan Ibu Arum Bidayati, S.IP, MPA



Gambar 24 Foto Bersama Para Pemenang

L JAMBORE NUTRISI SEIMBANG UNTUK SDM UNGGUL INDONESIA EMAS DI MOROTAI

Pencanangan Jambore Nutrisi Seimbang untuk SDM Unggul Indonesia pertama kali di wilayah terluar Indonesia timur yaitu di Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan rangkaian jambore ini berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2022 dilakukan kegiatan Advokasi Gerakan Masyarakat Sadar Pangan (Germas Sapa) tanggal 19 Mei 2022 dan Perlombaan Menu Sarapan Sehat bagi Orang tua Murid dan lomba mewarnai bagi anak SD kelas 1 dan 2 tanggal 19 Mei 2022 dan kegiatan Jambore Nutrisi Seimbang yang dihadiri oleh 200 orang terdiri atas anak-anak SD, kepala sekolah, guru dan orang tua murid serta lintas sektor. Kepada anak-anak diberikan informasi terkait Label dan Informasi Nilai Gizi dan Pilihan Lebih Sehat yang ada pada kemasan pangan. Juga dilakukan edukasi kepada guru, orang tua murid tentang cara membaca dan memahami nilai gizi yang tercantum pada label pangan yang tercantum pada label pangan olahan selain CEKLIK. Pada acara ini Kepala BPOM melakukan penyerahan nomor izin edar, sertifikat CPPOB dan sertifikat SMKPO kepada pelaku UMKM juga dilakukan penyerahan rapid test kit kepada Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Morotai dan 3 Desadi Kabupaten Morotai.



Gambar 25 Pencanaan jambore Nutrisi Seimbang di Morotai

MEWUJUDKAN PANGAN AMAN DAN BERNUTRISI UNTUK MEMBANGUN GENERASI MUDA BERKUALITAS DI DESA BIAU KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR

BPOM memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Biau Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur tentang pangan aman dan bernutrisi untuk memangun generasi muda berkualitas kepada remaja dan anak sekolah ini dapat meningkatkan komitmen, motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas desa dan sekolah (guru, siswa) bersama-sama mewujudkan keamanan, mutu dan gizi pangan bagi seluruh masyarakat. Konsumsi pangan aman dan bernutrisi seimbang oleh anak-anak akan melahirkan generasi sehat, berkualitas, dan mampu bersaing dikancah global. Pada kesempatan ini Kepala BPOM juga memberikan bantuan berbagai buku serta pedoman seperti Pedoman Pangan Jajanan anak sekolah untuk pencapaian nutrisiseimbang, komi kantin sekolah dan buku 5 kunci keamanan pangan kepada anak-anak sekolah di Desa Biau Kabupaten Malaka NTT.



Gambar 26 Kegiatan Edukasi keamanan pangan di Desa Biau Malaka NT

SK3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan

3.3.1 Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan

A. Bimbingan Teknis kader keamanan pangan

Pada tahun 2020 data kejadian luar biasa keracunan pangan berdasarkan laporan tahunan Badan POM sebanyak 45 kejadian menunjukkan tempat terjadinya KLB Keracunan pangan tertinggi yaitu di tempat tinggal 20 kejadian (45,5%), SD 7 kejadian (15,9%) dan kantor/pabrik sebanyak 4 kejadian (9,1%). Adapun urutan jenis makanan yang diduga menyebabkan keracunan pangan tertinggi adalah masakan rumah tangga sebanyak 22 kejadian (49%). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan pangan perlu terus ditingkatkan terutama di tingkat perseorangan melalui sosialisasi keamanan pangan bagi masing-masing individu sehingga mereka dapat selektif dalam memilih pangan aman untuk dikonsumsi.

Sosialisasi keamanan pangan kepada masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *community knowledge*. Agar sosialisasi keamanan pangan dapat dilaksanakan berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Komunitas sosial dan kemasyarakatan seperti Salimah, Aisyiyah, BKOW, PKK, Wirawati Catur Panca, Dharma wanita Persatuan, Muslimat NU, PP Fatayat NU, PP Nasyatul Aisyiyah dan Gerakan Kwartir Nasional Pramuka.

Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader keamanan pangan terhadap prinsip keamanan pangan.
2. Meningkatkan keterampilan kader keamanan pangan terkait Teknis pembuatan konten dan memanfaatkan media sosial.
3. Meningkatkan kemampuan kader keamanan pangan dalam melaksanakan dan melaporkan KIE keamanan pangan.

Pada tahun 2022 Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dilaksanakan di empat provinsi yaitu:

1. Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 4 -5 Juli 2022 dengan peserta bimtek sebanyak 59 orang. Nilai *pretest* yang dipersyaratkan sebesar lebih dari sama dengan 70. Nilai *pretest* rata-rata di Jakarta sebesar 85,05. Semua peserta bimtek (100%) telah memenuhi persyaratan nilai *posttest* minimal 80. Nilai *posttest* rata-rata sebesar 91,44 dan delta *pretest* dan *posttest* sebesar 6,38.
2. Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan di Kota Cirebon pada tanggal 24 -25 Mei 2022 dengan peserta 58 orang.
3. Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan di Kota Palu pada tanggal 14-15 Juni 2022 dengan peserta 61 orang. Nilai *pretest* yang dipersyaratkan sebesar lebih dari sama dengan 70. Nilai *pretest* .
4. Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan di Kota Palu dengan rata-rata sebesar 82,56. Semua peserta bimtek (100%) telah memenuhi persyaratan nilai *posttest* minimal 80. Nilai *posttest* rata-rata sebesar 89,17 dan delta *pretest* dan *posttest* sebesar 6,61.

5. Provinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan di kota Pontianak pada tanggal 10 - 11 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 59 orang.



Gambar 27 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan

Materi yang disampaikan menyesuaikan SKKNI Keamanan Pangan, terdiri dari:

Tabel 9 Materi Bimtek Kader Keamanan Pangan

NO	UNIT KOMPETENSI	MATERI
1.	Melakukan Bimbingan Teknis dan atau Sosialisasi Keamanan Pangan	Kebijakan keamanan pangan
		5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga
		Juknis Bimtek Kader Keamanan Pangan
		<i>Micro teaching</i> dan praktek melakukan sosialisasi KP
2.	Mengidentifikasi Penandaan/Label Pangan Olahan	Cek KLIK
3.	Menggunakan Aplikasi Pelaporan Pangan Olahan	Aplikasi Keamanan Pangan (praktek)
4	Tambahan	Pengenalan Balai POM di Palu
		Konten dan Algoritma Media Sosial
		Teknik Menulis Konten di Media Sosial serta Praktek
		Desain konten media sosial (infografis) dengan menggunakan smartphone dan praktek

B. SINERGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNITAS MELALUI DASA WISMA ENGAGEMENT.

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan kerjasama BPOM dan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak teredukasi di tahun 2023, akan dilaksanakan program kegiatan bersama sampai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) tingkat terkecil (Dasa Wisma/ Rukun Tetangga).

Kegiatan ini merupakan sinergitas BPOM dan Tim Penggerak PKK karena itu program ini mengusung tema **“Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Dasa Wisma Engagement”**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi, hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas Tim Penggerak PKK, yaitu Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Salah satu tujuan program kegiatan pemerintah menurunkan angka stunting di Indonesia (target prevalensi turun menjadi 14% di tahun 2024) menuju keluarga sejahtera agar tercapai Indonesia Sehat Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Tahun 2023 akan dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur karena prevalensi stunting tahun 2021 ketiga provinsi tersebut masih tinggi, yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 23,30%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 30,00% dan Provinsi NTT sebesar 37,8%

Pada tahun 2022 telah dilakukan pencetakan 90 Kader Keamanan Pangan Nasional khusus dari Tim Penggerak PKK Provinsi/Kota dengan *pilot project*/uji coba di 3 provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022), Jawa Barat dilaksanakan tanggal 20 September 2022 dan Jawa Timur dilaksanakan tanggal 28 September 2022. Kegiatan tersebut masing-masing dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur dan Ketua Tim Penggerak Kota Bandung.

Setiap Provinsi diikuti 30 peserta, sehingga total 3 Provinsi terlatih sebanyak 90 Kader KP. Kegiatan dilakukan terstruktur sehingga diharapkan masyarakat di level Dasawisma dapat teredukasi terkait keamanan pangan. Materi yang

disampaikan keamanan pangan dan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan, 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga, Cek Klik dan Aplikasi Keamanan Pangan, Praktek Sosialisasi/*Micro teaching* melakukan KIE dan Petunjuk Teknis Kader Keamanan Pangan.

Dengan adanya kader keamanan pangan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengadopsi praktek keamanan pangan yang baik dan dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi, sehingga risiko masyarakat terkena penyakit akibat pangan dapat diturunkan dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik. Para kader berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi keamanan pangan kepada anggota keluarga, ibu-ibu dan generasi milenial di lingkungan sekitarnya serta kelompok masyarakat lainnya secara pasif.

Jumlah KKPN Dasawisma yang melaksanakan KIE ke Dasawisma sebanyak 89 KKPN Dasawisma (Jawa Timur 29 KKPN, NTB 30 KKPN dan Jawa Barat 30 KKPN) dan 7435 orang yang tereduksi melalui KIE oleh KKPN Dasawisma.



Gambar 28 Pelaksanaan Bimtek KKPN Dasawisma di Mataram NTB



Gambar 29 Pelaksanaan Bimtek KKP Dasawisma di Bandung, Jawa Barat



Gambar 30 Pelaksanaan Bimtek KKP di Surabaya, Jawa Timur



Gambar 31 KIE oleh KKPN (menggunakan rompi KKPN)



Gambar 32 KIE oleh KKPN Materi 5 Kunci KP

C. Strategi Komunikasi Keamanan pangan

Untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, salah satunya menggunakan media Podcast. Sehubungan dengan hal tersebut, Dit. PMPUPO menyelenggarakan kegiatan Strategi komunikasi dilakukan melalui *channel Podcast* dengan nama *Podcast Klubpompi* untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang lebih menyukai mendengarkan informasi atau tipe audiotori.

Podcast ini didahului dengan penyediaan SDM dan sarana prasarana, yaitu dimulai dengan pelatihan Podcaster dan pelatihan pengelola podcast serta pembelian peralatan podcast seperti rodeocaster, speaker, dll.

Narasumber podcast berasal dari internal Kedeputian 3, yaitu Ibu Deputi dan PFM di Direktorat PMPUPO. Podcast diupload di sportify sehingga bisa didengarkan oleh masyarakat yang lebih luas,

Tabel 10 Link hasil podcast di Sportify

Episode	Link di Sportify	Judul
1	https://open.spotify.com/show/3EmeFRAmUBPg4eVJe3orOj	Yuk Kenalan dengan Podcast Klubpompi
2	https://open.spotify.com/episode/4UzTsk95yAHKulc5XAFsv7?si=N7PjpDmBS6KJClb9CQ4RRw&utm_source=whatsapp	Pembukaan RB Café Bersama Ibu Deputi
3	https://open.spotify.com/episode/3pl7TGH5VwcpZJqfSU3bhP?si=46a0d097616349bc	Masih Ingatkah Kamu Tentang Cek KLIK
4	https://open.spotify.com/episode/67mzUX6FYrLbq9ynseR2i0?si=1daa057f0d8c4af3	Pentingnya Cek Label Gizi Pada Kemasan Pangan Olahan
5	https://open.spotify.com/episode/3H2bV3bHtBnHOOYRE5u3IW	Cek Kedaluwarsa Pada Kemasan
6	https://open.spotify.com/episode/6uTrYgvNY0aDsDbCEQM9sR	Aneka Salad Versi Indonesia
7	https://open.spotify.com/episode/4drlVyeT0D9DXn5QGADFpl	Yogurt Vs Kefir, Serupa Tapi Tak Sama
8	https://open.spotify.com/episode/7DE0Yis5AaM6ModVgVFkff	Mengenal Izin Edar Pangan Olahan
9	https://open.spotify.com/episode/4EPBsEulKPMpcRO8si9iqe	Keamanan Pangan di Tahun Baru
10	https://open.spotify.com/episode/4TFQWTd1j6Hp0mFYMoTjTG	Bahas seputar Cek KLIK Bersama Bagas dan Ragil
11	https://open.spotify.com/episode/22m7PVfzSc4OJphgf6jSPY	Sudahkah kamu membudayakan Cek KLIK sebelum membeli dan mengonsumsi pangan olahan?



Gambar 33 Proses perekaman podcast

SK4. Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang

3.4.1 Jumlah PKP/Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan

A. PELATIHAN FASILITATOR BERBASIS KOMPETENSI

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar mengingat jumlahnya yang sangat besar. UMK juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, jumlah usaha Mikro yang ada sebanyak 55.856.756 dari jumlah total industri 55.888.700 atau sejumlah 99.94 %.

Peran UMK pangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi negara memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan peran penting dalam ekonomi rakyat sebagai penggerak ekonomi keluarga. Selain itu, UMK pangan merupakan aset Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan dan perluasan lapangan kerja dan lentur terhadap krisis serta merupakan alternatif usaha di masa krisis (dapat bertahan saat badai krisis ekonomi melanda Indonesia).

BPOM melaksanakan pengawasan *pre market* dan *post market*. Untuk pengawasan *pre market* dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan. Sedangkan untuk pengawasan *post market*, dengan sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Umumnya masalah yang dihadapi antara lain aspek higiene perorangan, sanitasi, pengelolaan lingkungan (sampah), fasilitas produksi belum bebas dari hama dan serangga, dan suplai air bersih. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam menerapkan persyaratan CPPOB di sarana produksi.

Sehingga diperlukan upaya peningkatan keamanan pangan di tingkat sarana produksi dan distribusi.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat, salah satu cara yang dilakukan oleh BPOM adalah pembinaan di bidang keamanan pangan dengan melakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Fasilitator Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan hal yang penting dilakukan sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan pangan sehingga para fasilitator ini bisa mendiseminasikan pengetahuannya kepada fasilitator daerah yang akan mensosialisasikan tentang Keamanan Pangan kepada pelaku usaha pangan. Sehingga diharapkan pelaku usaha pangan di Indonesia mampu memproduksi pangan dengan menerapkan prinsip keamanan pangan sehingga meningkatkan daya saing produknya ditengah persaingan global. Diharapkan UMK dapat mensuplai produk yang aman bagi masyarakat sehingga meningkatkan daya saing bangsa.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:

1. Memahami dengan baik tentang CPPOB dan penyusunan dokumen CPPOB.
2. Memberikan informasi terkini tentang keamanan pangan kepada Fasilitator yang diharapkan akan diteruskan oleh fasilitator daerah kepada UMK Pangan.
3. Meningkatkan pengetahuan Pelaku Usaha UMK pangan olahan dan masyarakat terkait keamanan pangan.

Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama Berbasis Kompetensi Bets 1, telah diselenggarakan pada tanggal 2,4 dan 5 Maret 2022 secara klasikal daring, dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan Fasilitator Nasional berasal dari AISYIYAH, SALIMAH, IPEMI, HIPMIKINDO, IWAPI, BIG Indonesia, KOPITU dan Nasyiatul Aisyiyah. Dari 30 peserta yang terdaftar, seluruh peserta hadir pada saat pelatihan. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan sebanyak 23 orang

(76 %), sedangkan 7 orang (24%) peserta dinyatakan tidak berhasil menyelesaikan output (tugas) yang dipersyaratkan, sehingga dinyatakan tidak lulus pelatihan.

Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi Bets 2 bagi Fasilitator Keamanan Pangan telah dilaksanakan dengan dua metode yaitu:

1. Pengayaan materi awal melalui *E-Learning* Istana UMKM pada tanggal 23-27 Juni 2022, dengan materi: 1) Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Penggunaannya, 2) Kemasan Pangan, 3) Label Pangan Olahan, 4) Tata Cara Memperoleh Izin Edar Pangan Olahan, 5) Tata Cara Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan (SPP-IRT).
2. Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi pada tanggal 28-30 Juni 2022 dengan kurikulum 29 JPL dan topik pembelajaran kompetensi terdiri dari: 1) Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan, 2) Menyediakan Informasi Pekerjaan, 3) Mendesain Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/*Good, Manufacturing Practices* (GMP) dan Sanitation Standard Operation, Procedures (SSOP). Peserta terdiri dari 30 orang yang berasal dari Kaji-Fokus UMKM sebanyak 22 orang, peserta dari Garda Transfumi Jawa Barat sebanyak 6 orang, peserta dari PP Salimah sebanyak 1 orang, peserta dari Dit PMPUPO sebanyak 1 orang.

Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi Bets 3 bagi Fasilitator Keamanan Pangan telah dilaksanakan dengan dua metode yaitu:

1. Pengayaan materi awal melalui *E-Learning* Istana UMKM pada tanggal 29–31 Juli 2022, dengan materi: 1) Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Penggunaannya, 2) Kemasan Pangan, 3) Label Pangan Olahan, 4) Tata Cara Memperoleh Izin Edar Pangan Olahan, 5) Tata Cara Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan (SPP-IRT).
2. Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi pada tanggal 1–4 Agustus 2022 dengan kurikulum 32 JPL dan topik pembelajaran kompetensi terdiri dari: 1) Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan, 2) Menyediakan Informasi Pekerjaan, 3) Mendesain Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/*Good, Manufacturing Practices* (GMP) dan Sanitation Standard Operation, Procedures (SSOP). Pelatihan dilakukan secara hybrid, luring: Hotel Aryaduta, Jakarta.

Peserta berjumlah 29 orang, terdiri dari: 5 orang perwakilan dari BIG Indonesia, 4 orang perwakilan dari IPEMI, 2 orang perwakilan dari PP Salimah, 1 orang perwakilan Fatayat NU, 1 orang perwakilan Aisyiyah, 1 orang perwakilan Kopitu, 2 orang perwakilan Hipmikindo, 1 orang perwakilan IWAPI, 1 orang perwakilan Inkubator Bisnis Universitas Warmadewa, 10 orang perwakilan Garda Transfumi, 1 orang perwakilan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Denpasar.

Hasil dari pelatihan menunjukkan 22 orang peserta telah menyelesaikan penugasan, kehadiran 100% saat pelatihan, memperoleh nilai minimal 80 dan menyatakan dirinya kompeten, sehingga dapat dinyatakan LULUS. 4 orang peserta dengan kehadiran di bawah 100% dengan rincian sebanyak 2 peserta memenuhi kehadiran 50%, 1 peserta kehadiran 25%, serta 1 peserta kehadiran 0%, sehingga dinyatakan TIDAK LULUS. 3 orang peserta kehadiran 100% dalam pelatihan, namun tidak memenuhi standar nilai kelulusan (minimal 80), sehingga dinyatakan TIDAK LULUS.

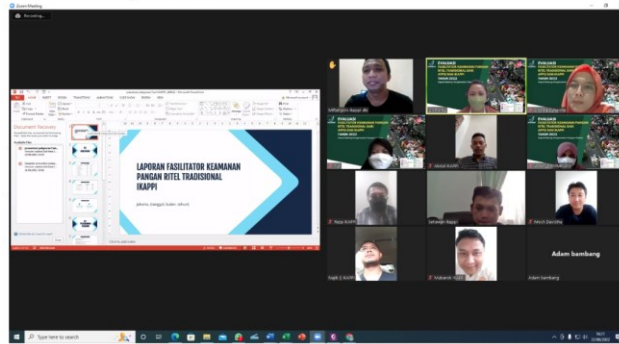
B. PEMBINAAN USAHA RITEL PANGAN DALAM RANGKA SISTEM JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN PEREDARAN

Pembinaan usaha ritel yang dilakukan yaitu membentuk Fasilitator Ritel Tradisional dengan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Ritel Tradisional dari APPSI dan IKAPPI yang berlangsung selama 2 hari: 20 April dan 21 April 2021. Kegiatan berlangsung secara *offline* dan *online* serta dihadiri oleh peserta yang berasal dari APPSI, IKAPPI. Jumlah fasilitator nasional yang terbentuk, yaitu 31 fasilitator nasional.



Gambar 34 Peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Ritel Tradisional

Tugas fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional, yaitu melakukan sosialisasi Keamanan Pangan Kepada anggota APPSI / IKAPPI di daerah dan pedagang Pasar Tradisional serta anggota APPSI / IKAPPI di Daerah yang telah disosialisasi melakukan sosialisasi keamanan pangan ke 10 (sepuluh) orang anggota APPSI / IKAPPI / pedagang Pasar Tradisional. Jumlah Fasilitator Daerah yang terbentuk yaitu 750 fasilitator dan jumlah pedang yang telah disosialisasi terkait keamanan pangan, yaitu 897 orang pedagang.



Gambar 35 Monev Fasilitator Nasional Keamanan Pangan di Ritel

C. PELATIHAN PKP BAGI UPT BPOM DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP DI UMKM

Pelatihan PKP ini merupakan pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) berbasis kompetensi dengan mengacu pada unit-unit kompetensi sesuai skema okupasi PKP Pertama dan PKP Muda dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.

Tujuan diselenggarakannya Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Fasilitator ini adalah untuk menyiapkan petugas UPT BPOM dalam melakukan Program Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP bagi UMK Pangan Olahan di wilayah kerjanya masing-masing. Program Pendampingan ini telah menjadi Indikator Kerja UPT BPOM tahun 2022-2024.

Pelatihan dilaksanakan sesuai skema kompetensi PKP Pertama dan PKP Muda yaitu PKP Pertama dilaksanakan secara daring selama 4 (empat) hari dengan narasumber

dari internal Kedeputan III BPOM, sedangkan PKP Muda dilaksanakan di Jakarta, *fullboard meeting* selama 5 (lima) hari dengan narasumber dari Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah tersertifikasi oleh BSN.

Target yang direncanakan adalah terlatihnya 90 orang petugas BPOM dengan kompeten PKP (Pertama atau Muda). Output yang dihasilkan sebanyak 37 orang lulus pelatihan PKP Pertama dan 71 orang petugas UPT BPOM lulus pelatihan PKP Muda, sehingga total peserta yang telah dilatih dan lulus pelatihan PKP Pertama atau muda sebanyak 108 orang (120%). Hal ini disebabkan karena kebutuhan UPT BPOM akan tenaga PKP yang masih belum memadai sehingga perkelas dilaksanakan lebih dari 30 orang peserta.



Gambar 36 Pelatihan PKP Pertama

D. PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SKKNI PENYULUH KEAMANAN PANGAN TK.I

Program Pangan Aman Goes to Campus selaras dengan salah satu bentuk pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu magang kerja.

Terobosan baru dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK Pangan olahan terlebih dahulu dibekali kompetensi sebagai Fasilitator Keamanan Pangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan UMK Pangan Olahan.



Gambar 37 Pembukaan Pelatihan PKP Tingkat Pertama oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan



Gambar 38 Presentasi dan Diskusi pada Pelatihan PKP Tingkat Pertama

Pada tahun 2022, program Pangan Aman Goes to Campus telah berhasil mencetak 219 mahasiswa dan 8 Dosen sebagai Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Pertama.

Pelatihan PKP Tingkat Pertama selaras dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.

3.4.2 Indeks Pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

A. SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN OLEH FASILITATOR

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan POM adalah pembinaan di bidang keamanan pangan dengan melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi UMK Pangan. Sosialisasi Keamanan Pangan merupakan kegiatan yang penting dilakukan sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan pangan sehingga UMK di Indonesia mampu memproduksi pangan dengan menerapkan prinsip keamanan pangan sehingga meningkatkan daya saing produknya di tengah persaingan global. Diharapkan UMK dapat mensuplai produk yang aman bagi masyarakat sehingga meningkatkan daya saing bangsa.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMK pangan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan melalui Fasilitator Keamanan Pangan.

Capaian kegiatan pemberdayaan fasilitator keamanan pangan tahun 2022:

1. Fasilitator Nasional yang bertugas tahun 2022 sebanyak 88 orang.
2. Fasilitator Nasional yang telah mengikuti pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama Berbasis Kompetensi sebanyak 88 orang.

3. Capaian Fasilitator Daerah adalah 297 orang (64,57%) dari target 440 orang
4. Capaian UMKM yang tersosialisasi adalah 3.211 UMKM.

B. PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

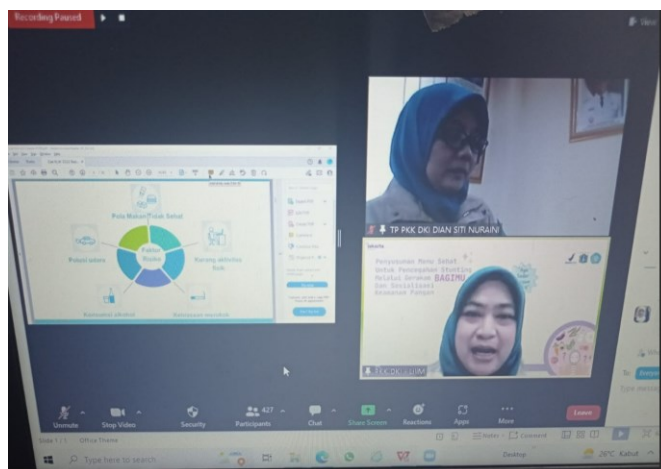
Tahun 2022 Pandemi Covid 19 masih berlangsung meski sudah mulai mereda. Oleh karena itu penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan bisa secara *hybrid*. *Hybrid* artinya dapat dilaksanakan secara *online* dan *offline* berbarengan. Pelaksanaan secara *offline* diatur dengan tetap memperhatikan jarak antar peserta agar berkomunikasi dengan menjaga jarak. Disediakan penggantian pulsa bagi pegawai dan peserta program KIE karena pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online. Selain itu juga disediakan biaya tes swab jika akan dilakukan pertemuan offline dihotel atau suatu tempat tertentu.

SK 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan

3.5.1 Tingkat efektivitas KIE Makanan

A. KIE KADER KEAMANAN PANGAN

Kader Keamanan Pangan mempunyai tugas untuk melaksanakan KIE Keamanan pangan di komunitas masing-masing. Kader dapat melaksanakan KIE secara langsung melalui tatap muka, webinar, siaran radio, siaran televisi, siaran podcast, youtube, dan lain sebagainya maupun melalui media sosial seperti di instagram, facebook, wag, telegram, tiktok, dan lain sebagainya. Capaian kader yang melaksanakan KIE sebesar 102,5%.



Gambar 39 KIE oleh Kader melalui tatap muka dan webinar

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Permasalahan keamanan pangan atau potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, konsumen dan industri pangan. Jadi tanggung jawab akhir keamanan pangan tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga pada produsen pangan, pengolah, distributor, retailer yang menyiapkan, menyajikan dan mengedarkan pangan serta konsumen.

Pembangunan keamanan pangan dapat dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini, sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari

kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM telah menginisiasi program Keamanan Pangan melalui pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, Label dan Iklan Pangan.

Dewasa ini adanya kemajuan teknologi memberikan banyak bagi kehidupan, selain dampak pada percepatan informasi kepada masyarakat, namun hal ini juga berdampak pada semakin mudah beredarnya berita hoax yang menyesatkan. Untuk itu masyarakat perlu memperoleh edukasi yang baik agar senantiasa menyaring informasi yang diperoleh sebelum *sharing* atau menyebarluaskan kepada keluarga, komunitas, lingkungan maupun masyarakat. Selain mewaspadaai informasi yang menyesatkan, informasi yang perlu dan penting untuk dipahami masyarakat yaitu mengenai tata cara pendaftaran pangan merupakan suatu informasi yang penting diketahui terutama oleh para pelaku usaha atau Usaha Mikro Kecil (UMK) Pangan, agar pelaku usaha selaku produsen mampu memberikan jaminan akan produk yang beredar di masyarakat. Bagi masyarakat hal ini juga perlu diketahui agar masyarakat juga memahami bagaimana memilih produk pangan yang sesuai dengan ketentuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan KIE terkait Keamanan Pangan, dan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait sinergitas upaya pemberdayaan masyarakat melalui KIE. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan keamanan pangan di lingkungannya secara mandiri serta mensinergikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE seputar Obat dan Makanan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin tinggi pula kepedulian dan kesadarannya sehingga mampu untuk membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk yang tidak berkualitas. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan;
2. Mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan pangan;
3. Menyampaikan informasi mengenai tata cara pendaftaran produk pangan;
4. Meningkatkan peran serta berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi mengenai Keamanan Pangan;
5. Mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat mengenai Obat dan Makanan antar pemangku kepentingan..

Pelaksanaan kegiatan KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Kota Cirebon tanggal 20-22 Maret 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara *Hybrid* (Luring dan Daring). Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Maret 2022. Tempat Pelaksanaan kegiatan secara *Hybrid* (Luring dan Daring). Luring dilakukan melalui tatap muka. di GOR KPRI, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat (pada hari pertama). Sedangkan KIE hari kedua dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 di Kafe TSB, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt., MP dan Ruki Fanaike, S.T.P., MP bersama Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI Komisi IX yaitu Dr. Ir. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perlu dilaksanakan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan tokoh panutan masyarakat yang didengar oleh masyarakat, salah satunya Anggota Komisi IX DPR RI, yaitu Ibu Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

KIE dilaksanakan di Kabupaten Cirebon tanggal 24 dan 25 Juni 2022 dengan Narasumber dari BPOM Dra. Indrimayatie Asri Gani, Apt, dengan masing-masing peserta setiap titik/ hari sebanyak 250 orang yang berasal dari Organisasi Wanita, Pelaku UMKM, Karang Taruna, masyarakat umum, perwakilan desa dan tokoh masyarakat di desa. Materi yang disampaikan terkait Keamanan Pangan.

KIE tanggal 24 Juni 2022 dilaksanakan GOR Kecamatan Pabedilan Jalan Mayjend Sutoyo Dusun 1 Rt 01 Rw 01 Desa, Pabedilankidul, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon dan tanggal 25 Juni 2022 dilaksanakan Gedung Islamic Centre Kabupaten Cirebon, Jalan Tuparev No. 111, Kedawung, Kab. Cirebon.

D. SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMK sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan POM adalah melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan berupa Webinar Series kepada Pelaku Usaha UMK pangan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah

- Meningkatkan pengetahuan Pelaku Usaha UMK pangan dan masyarakat terkait keamanan pangan
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinyu antar Kementerian/Lembaga/Pemda/Organisasi/Akademisi/*E-commerce* dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada UMK Pangan.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan pangan yaitu UMK pangan olahan (pangan siap saji, pangan olahan terkemas dan ritel pangan termasuk Pedagang Kreatif Lapang). UMK Pangan olahan terkemas (risiko rendah, sedang maupun tinggi) yang akan didampingi dalam menerapkan CPPOB dan mengurus Nomor Izin Edar BPOM MD. Kegiatan ini menghasilkan keluaran berupa UMK pangan yang meningkat pengetahuannya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada UMKM tahun 2022 sebagai berikut:

1. UMKM CAMP Pengawasan Keamanan Pangan MotoGP Mandalika 23–24 Februari 2022 dan 8-9 Maret 2022 dengan peserta 2206 orang.
2. UMKM CAMP Peningkatan Peran Pelaku Usaha untuk Percepatan Legalitas Produk Pangan Olahan dan Pencegahan PTM 18 Agustus 2022 dengan peserta 1205 orang.
3. UMKM CAMP Perizinan Berusaha dalam rangka Pengawasan Keamanan Pangan G20 mendukung UMK Berdaya Saing menuju Pemulihan Ekonomi Nasional 24-25 Oktober 2022 dengan peserta 737 orang.
4. UMKM CAMP Perizinan Berusaha dalam rangka Pengawasan Keamanan Pangan G20 mendukung UMK Berdaya Saing menuju Pemulihan Ekonomi Nasional 14 November 2022 dengan peserta 663 orang.

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN

KIE Bersama Tokoh Masyarakat di Kabupaten Indramayu tanggal 18-19 Juli 2023

- KIE Tomas tanggal 18 Juli 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di Islamic Center Jl. Soekarno Hatta No.1 Pekandangan Kec.Indramayu Kab. Indramayu. <https://maps.app.goo.gl/yMBqCzY1k8fWmKtSA>.

Narasumber kegiatan ini yaitu Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt., MP. dan bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI Ibu Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si

- KIE Tomas tanggal 19 Juli 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di GOR Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kab Indramayu. Narasumber kegiatan ini yaitu Koordinator Pemberdayaan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Dra. Dyah SUIstyorini, Apt., M.Sc bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI Ibu Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

3.5.2 Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan

A. PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN MITRA KERJA

Kegiatan peningkatan kapasitas mitra kerja dilakukan dengan melaksanakan pertemuan dengan ormas untuk berkolaborasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi kegiatan agar tujuan kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan tahun 2022 dapat tercapai serta terlaksana dengan efektif dan efisien.

Pertemuan ini merupakan salah satu upaya BPOM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan. Pertemuan ini telah dihadiri oleh perwakilan dari 10 Organisasi Kemasyarakatan, yaitu Wirawati Catur Panca, Salimah, Aisyiyah, Kowani, Dharma Wanita Persatuan, PKK, Muslimat NU, Fatayat NU, Nasyyatul Aisyiyah, dan Gerakan Pramuka.

Perwakilan Pusat Ormas dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka serta perwakilan Komunitas sepakat memberikan dukungan dalam program Bimbingan Teknis dan

Pengawasan Kader Keamanan Pangan kepada Perwakilan Daerah dan Perwakilan Wilayahnya. Diharapkan kerjasama dgn ormas terus berjalan dengan baik dan terwujud sinergitas program kerja antara ormas dan BPOM.

B. PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan khususnya Gerakan Pramuka dikuatkan dengan adanya penandatanganan MoU antara BPOM dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang dilaksanakan tanggal 25 November 2022 di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM Dr Penny K Lukito dengan Ketua Umum kwartir Nasional Budi Waseso merupakan pembaharuan kerjasama yang sebelumnya telah berakhir pada Februari 2022. Dalam sambutannya Kepala BPOM menyampaikan penghargaan untuk dukungan penguatan pengawasan obat dan makanan melalui berbagai kegiatan bersama dalam Rintisan Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM). Sejak tahun 2018 BPOM telah menginisiasi pembentukan dan pengembangan Rintisan Saka POM bersama Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia. Melalui Rintisan Saka POM ini, BPOM telah mengembangkan 3 (tiga) Krida sebagai wadah kegiatan, yaitu Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, dan Krida Informasi Obat dan Makanan.



Gambar 40 Penandatanganan MoU antara BPOM dengan Kwarnas Gerakan Pramuka

Pemberdayaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dilakukan melalui keikutsertaan dalam Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur tanggal 15,16,18,19 Agustus 2022, webinar Paman Kece series 1-12 serta kegiatan ormas yang mengajar BOOM berkolaborasi seperti juri lomba video Tim Penggerak PKK, webinar untuk pelaku usaha dan masyarakat bersama Muslimat NU dan webinar bersama Ibu Sibux Orami.

Jambore Nasional

Kegiatan Jambore Nasional dilaksanakan tanggal 15,16, 18 dan 19 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan Cibubur jam 8.00-17.00. Badan POM menjadi bagian dari *Global Development Village* Keamanan Pangan. Setiap hari ada 2 (dua) rotasi. Untuk pagi hari, peserta berasal dari Penggalang (11-15 tahun) Putra dan siang hari, peserta dari Penggalang Putri. Petugas/Narasumber berasal dari Dit. PMPUPO, RPO, Wasdar, Pusdatin dan BBPOM di Jakarta

Kegiatan per rotasi selama Jamnas XI sebagai berikut:

- Pameran terkait obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, bahaya rokok
- Pemberian materi keamanan pangan dan nutrisi; Cek KLIK; pemantauan iklan pangan, pemanfaatan Aplikasi BPOM Mobile, Cek BPOM, dan Pramuka Sapa; pengujian sederhana melalui praktek Rapid Test Kit Bahan Berbahaya. pada pangan. Setiap peserta mendapat goodie bag (tas, tumbler, mug, PIKP)
- Coaching clinic/konsultasi
- Permainan ular tangga, pembuatan konten medsos/podcast, pembagian hadiah
- Photo booth dengan tagline keamanan pangan
- Anggota Pramuka meneriakkan Yel-yel "Pramuka SaPa, Pramuka Sadar Pangan Aman. Yes!"
- Narasumber dari Dit PMPUPO : Indriemayatie, Ratna Wulandari, Ima Ananda, Lia Astriana dan Sandyani

Tabel 11 Jumlah peserta Jamnas yang mendapat sosialisasi BPOM

Tanggal	Pagi (Laki-laki)	Siang (Perempuan)
15 Agt 2021	36	29
16 Agt 2021	29	30
18 Agt 2021	22	20
19 Agt 2021	23	19
Jumlah	110	98
Total	208	



Gambar 41 Peserta Jamnas tanggal 18

Webinar Paman Kece Series

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas dilaksanakan webinar Keamanan Pangan untuk Konsumen Cerdas/ Paman Kece series yang rutin dilaksanakan tiap bulan. Agar materi dapat dilihat/ tonton kembali, pelaksanaan webinar diupload di youtube klubpompri sehingga dapat menambah masyarakat yang teredukasi. Dalam kurun waktu 2022 ada 12 seri, yaitu:

- Seri 1 tanggal 8 Februari 2022: Keamanan Pangan di Tangan Kita; Membangun Hidup Seimbang Bermakna-Motivator;
- Seri 2 tanggal 25 Februari 2022: 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga: *Sharing Experience* and Strategi sebagai Kader Keamanan Pangan- Kader Pemenang Lomba Kader KP Desa;
- Seri 3 tanggal 31 Maret 2022: Pentingnya membaca Informasi Nilai Gizi Pangan Olahan: Jurus Pintar Kelola Gizi Menu Harian yang Aman.

- Seri 4 tanggal 28 April 2022: Pengawasan Pangan Ramadhan dan Idul Fitri; Tips Memilih Pangan dan Parsel Lebaran Yang Aman; Registrasi dan Sertifikasi Halal Produk Pangan serta Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal-BPJPB;
- Seri 5 tanggal 30 Mei 2022: Cek KLIK; Gunakan Kemasan dan Peralatan Makan dan Masak yang Aman;
- Seri 6 tanggal 8 Juli 2022: Pengawasan Hewan dan Pengelolaan 5 Kurban (Pasca Penyembelihan, Penyimpanan dan Pengolahan oleh Konsumen)-Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian; 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Idul Adha;
- Seri 7 tanggal 26 Juli 2022: Program Pengawasan PJAS; 5 (Lima) Kunci Memilih Jajanan Anak Sekolah yang Aman;
- Seri 8 tanggal 16 Oktober 2022: Peran BPOM Melindungi Konsumen melalui Registrasi Pangan Olahan; 5 Kunci Keamanan Pangan;
- Seri 9 tanggal 27 Oktober 2022: Pesan terkait Hari Pangan Sedunia Tahun 2022-FAO; Strategi Bersama Wujudkan Pangan Kuat, Indonesia Berdaulat-Direktorat Pengawasan Penerapan Standar, Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.
- Seri 10 tanggal 16 November 2022 :*Pangan Goes to Campus*.
- Seri 11 tanggal 28 November 2022: Media Sosial untuk Berbagi Informasi Keamanan Pangan, Saring sebelum *Sharing*
- Seri 12 tanggal 29 Desember 2022: Perempuan Berdaya, Keluarga Sehat, Ekonomi Kuat menuju Indonesia Maju



Gambar 42 Contoh Seri Keamanan Pangan dalam webinar Paman Kece

Kegiatan Ormas Mengajak BPOM Kolaborasi

a. Kerjasama dengan Tim Penggerak PKK

Tahun 2022 BPOM juga berkontribusi menjadi salah satu juri lomba Vlog "Pangan Aman menuju Generasi Emas" yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK

b. Kerjasama dengan Muslimat NU

Kegiatan berupa webinar nasional yang mengundang seluruh warga Muslimat NU se Indonesia. Webinar dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan materi Keamanan Pangan.

c. Kerjasama dengan Ibu Sibux Orami

Kegiatan webinar Ibu Sibux Orami dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu tanggal 27 Januari 2022, 4 Maret 2022, 21 Juni 2022 dan 28 Juli 2022. Materi yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga, Cek KLIK dan Tata Cara Pendaftaran SPPIRT. Agar materi dapat dilihat/ tonton kembali, pelaksanaan webinar diupload di youtube klubpomi sehingga dapat menambah masyarakat yang teredukasi.

**Untuk Mewujudkan Keamanan Pangan, Badan POM
Menerapkan Sistem Pengawasan 3 Pilar :**

KEAMANAN PANGAN

 Jaminan Keamanan Pangan & Mutu Pangan PELAKU USAHA PANGAN	 Memastikan Keamanan Pangan & Mutu Pangan PEMERINTAH	 Hak untuk Pangan yang Aman, Berkualitas, & Bermutu KONSUMEN
Peningkatan Kesadaran Keamanan Pangan di semua Pilar		

5:18 / 1:38:20 @bpom_ri @klubpomi @ditmpu_po <https://www.pom.go.id>

Gambar 43 Pelaksanaan webinar bersama Ibu Sibux Orami dan Direktur PMPUPO

SK6. Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan

3.6.1 Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan

A. ASISTENSI REGULASI DAN SOSIALISASI APLIKASI PELAPORAN SPP-IRT

Dengan terbitnya PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka penerbitan SPPIRT yang selama ini memerlukan waktu minimal 3 (tiga) bulan dipangkas menjadi 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan aplikasi SPPIRT yang terintegrasi OSS RBA yang difasilitasi oleh Badan POM.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memegang peran kunci dalam pelaksanaan amanat peraturan pemerintah tersebut dengan berperan aktif dalam membina UMKM Pangan Olahan dan melakukan pengawasan terhadap pangan yang diproduksi dan beredar di daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan penerbitan SPP-IRT dan pengawasan *post market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, pada pasal 55 dinyatakan bahwa Kepala Badan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap Pengawas Pangan secara terpadu dan berkelanjutan.

Terkait hal itu pada tahun 2022 telah dilakukan Asistensi Regulasi pada 6 (enam) provinsi (104 kabupaten/kota) yaitu di Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Aceh.

Dalam kegiatan Asistensi Regulasi ini disampaikan materi-materi terkait yaitu:

1. Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Papua, Maluku, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Aceh yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar/Balai POM dan Loka POM atau yang mewakili.
2. Pedoman Pemberian SPPIRT yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
3. Prosedur Pengurusan Usaha BKPM yang disampaikan oleh narasumber dari BKPM
4. Penggunaan Aplikasi SPPIRT terintegrasi OSS RBA yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
5. Label Pangan Olahan yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.
6. Cara Produksi Pangan yang Baik PIRT yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
7. Tata Cara Pemeriksaan Sarana produksi Pangan yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) hari yang dilakukan secara *hybrid* dengan mengundang peserta dari Dinas Kesehatan yang bertugas dalam melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) serta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menerbitkan SPPIRT di wilayah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Asistensi Regulasi dihasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengawasi pelaku usaha UMKM pangan olahan di wilayahnya.

Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyesuaikan aturan baru tersebut.
2. Teknis penerbitan SPP-IRT dan pengawasannya dilakukan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- b. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- c. Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga
- d. Peraturan Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dalam penerbitan SPP-IRT yang telah diterbitkan. Pengawasan dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kabupaten/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota melakukan monitoring/pengawasan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap perizinan SPP-IRT sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar menganggarkan pengawasan pemenuhan komitmen termasuk pelaksanaan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP baik secara kelas konvensional, diskusi kelompok kecil, tatap muka perorangan maupun metode lain misal melalui *e-learning* atau secara daring.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota agar melaksanakan sosialisasi dan pelayanan pengajuan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai dengan kemampuan dan anggaran Pemerintah Daerah masing-masing.



Gambar 44 Pelaksanaan Asistensi Regulasi di Banda Aceh



Gambar 45 Penandatanganan Rekomendasi Asistensi Regulasi di Banten

Selain itu, keamanan pangan menjadi tanggung jawab semua pihak baik instansi pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Implementasi keamanan pangan di sepanjang rantai pangan ini perlu dilaksanakan secara terpadu agar dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Keamanan pangan juga dapat mendukung penurunan stunting. Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa intervensi keamanan pangan oleh pemerintah kab/kota merupakan salah satu kegiatan intervensi sensitif dalam program percepatan penurunan stunting.

Untuk keterpaduan dalam pelaksanaan keamanan pangan, Presiden RI memberikan instruksi yang dituangkan pada Inpres 3 Tahun 2017 kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota untuk bersinergi satu sama lain dan berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dimana Badan POM sebagai koordinator teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Langkah konkrit yang dilakukan BPOM dalam hal peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah adalah BPOM melakukan koordinasi lintas sektor baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM (Pasal 3) yaitu Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan

Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, Badan POM melalui Direktorat PMPUPO akan melaksanakan advokasi keamanan pangan kepada pemerintah daerah agar dapat terwujud komunikasi dua arah antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Advokasi keamanan pangan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu untuk pemerintah daerah regional barat pada tanggal 25 Mei 2022 dan untuk pemerintah daerah regional tengah dan timur pada tanggal 27 Juli 2022. Jumlah peserta yang mengikuti advokasi regional barat adalah sebanyak 917 orang, sedangkan peserta advokasi regional tengah dan timur sebanyak 1.716 orang. Peserta yang hadir berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, BKKBN, perwakilan pemerintah desa/perangkat desa, serta perwakilan BB/Balai/Loka POM.

Narasumber advokasi:

- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan, BKKBN
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, BPOM
- Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, BPOM

Output advokasi adalah rekomendasi untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa agar melaksanakan intervensi keamanan pangan untuk mendukung output pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana terdapat 2 (dua) kegiatan terkait keamanan pangan yaitu intervensi keamanan pangan oleh Kab/Kota dan pengawasan produk pangan fortifikasi.
- Pemerintah Provinsi agar memastikan pencapaian target pada indikator persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa agar melakukan perencanaan program keamanan pangan yang dapat disinergikan dengan program percepatan penurunan stunting melalui penganggaran secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes.
- Dalam pelaksanaan program keamanan pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melakukan replikasi program pemberdayaan masyarakat yang telah diinisiasi oleh Badan POM (Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman dan lain-lain) atau melakukan konvergensi pelaksanaan program keamanan pangan dengan program yang ada di daerah masing-masing.



Gambar 46 Dokumentasi Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat



Gambar 47 Dokumentasi Advokasi Keamanan Pangan Regional Tengah dan Timur

B. SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA MASYARAKAT ATAU INDIVIDU

Untuk menjawab tantangan dan peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan ke depan, maka salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada masyarakat maupun individu sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari produk yang tidak memenuhi kesehatan

Peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang keamanan pangan, diharapkan mampu menciptakan budaya masyarakat yang peduli dalam mengkonsumsi pangan yang aman serta mandiri memilih pangan yang bermutu dan bermanfaat bagi kesehatan

Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keamanan pangan tentu bukan hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Dalam hal ini diperlukan dukungan *stakeholder* baik tokoh masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha dan tentu dukungan langsung dari masyarakat.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 1 April 2022 dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di Kota Cirebon bersama tokoh masyarakat Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Andalusia dihadiri oleh 250 orang yang berasal dari Organisasi Wanita, Karang Taruna, Pelaku Usaha UMKM dan masyarakat di wilayah Kota Cirebon.



Gambar 48 Sosialisasi Keamanan Pangan melalui di Kota Cirebon bersama tokoh masyarakat Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

SK7. Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

3.7.1 Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman

A. PERKUATAN LINTAS SEKTOR DALAM PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN

UMKM pangan berperan strategis dalam menyediakan pangan yang aman dan bermutu. UMKM juga menggerakkan perekonomian rakyat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM tahun 2020, diketahui hasil data hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan ditemukan sebanyak 2.153 sarana (50,28%) Memenuhi Ketentuan, 2.024 sarana (47,27%) Tidak Memenuhi Ketentuan, dan 105 sarana (0,35%) tutup/tidak aktif/tidak dapat dinilai. Kegiatan sampling dan pengujian sebesar 4.095 sampel (23,05%) Tidak Memenuhi Syarat dari 17.763 sampel yang diuji. Sedangkan data pengawasan iklan pangan olahan sebesar 3.544 iklan (33,15%) Tidak Memenuhi Syarat dari 10.688 iklan.

Dalam rangka peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan berdaya saing, sepanjang tahun 2013 - 2020 jumlah UMK pangan olahan yang telah diintervensi oleh BPOM sebanyak 74.905 sarana. Jumlah UMK yang terdaftar sebanyak 1.282 dan Kecil sebanyak 2.286 sedangkan Nomor Izin Edar (NIE) yang telah diterbitkan sampai bulan November 2021 dari sarana mikro sebanyak 2.600 NIE dan sarana kecil sebanyak 10.537 NIE. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah UMK pangan olahan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah, termasuk BPOM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia untuk melakukan

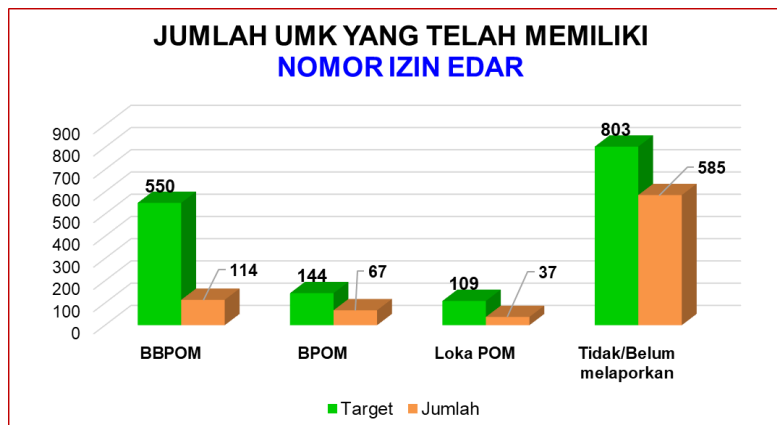
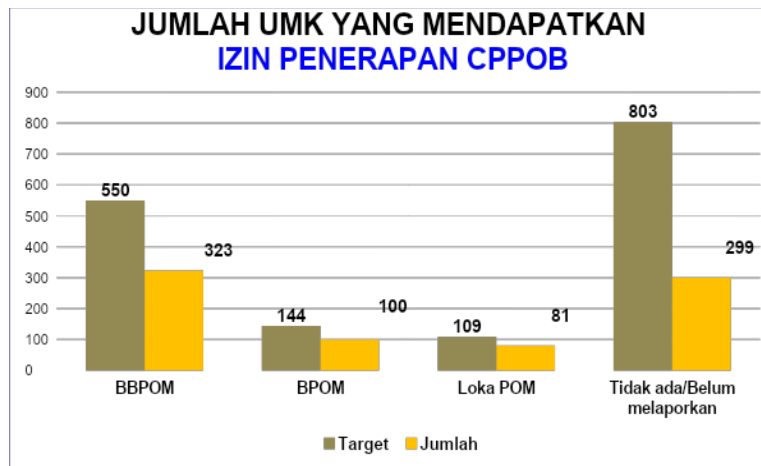
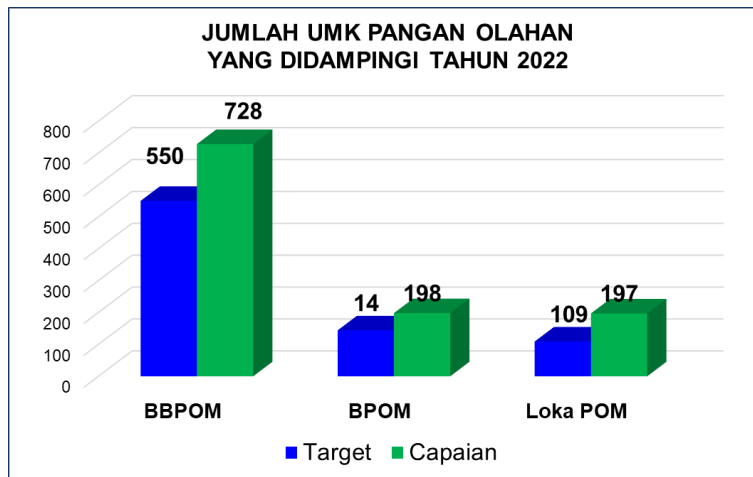
pembinaan kepada UMK pangan olahan dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga persyaratan keamanan dan mutu produk pangan terpenuhi yang dapat meningkatkan daya saing UMK pangan olahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pangan Olahan, tahapan pelaksanaan pendampingan bagi UPT BPOM dapat dilakukan dalam beberapa tahapan:

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan *coaching clinic* Izin
3. Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan pengajuan permohonan perizinan;
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan;
5. Pelaporan; dan
6. *Monitoring* Pasca Pendampingan.

Berdasarkan Laporan UPT BPOM Tahun 2022, seluruh UPT BPOM telah melakukan Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan dengan jumlah UMK sebanyak 1.123 UMK dari 803 UMK target yang telah ditentukan (139,85%). Dari hasil pendampingan tersebut, didapatkan sebanyak 504 UMK yang sudah memiliki Izin Penerapan CPPOB (62,76%) dan 218 UMK yang sudah memiliki NIE (27,15%).

Secara keseluruhan, Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan merupakan sebuah langkah yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi para pelaku usaha UMKM, terutama di sektor Usaha Mikro Kecil Pangan Olahan. Meningkatnya *Regulatory Assistance* Pengembangan Makanan dengan Indikator Kinerja Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan dengan target 2022 sebesar 54%, capaian ini pada Tahun 2022 melebihi target yaitu 83,81%.



Gambar 49 Capaian dari program Pendampingan UMK

Melalui dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh UPT BPOM, UMKM dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang CPPOB dan menerapkannya dalam produksi mereka. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap keamanan dan

kualitas produk, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi saat ini. Dengan adanya standar minimal yang jelas dan komitmen yang kuat dari pelaku usaha, diharapkan program ini dapat terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta memberikan dukungan yang berarti bagi perkembangan UMKM di sektor pangan.

B. PROGRAM ORANG TUA ANGKAT UMK PANGAN OLAHAN

Pemberdayaan pelaku usaha dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK pangan olahan, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian / Lembaga / Industri menyelenggarakan Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan.

Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan merupakan program yang ditawarkan oleh Badan POM kepada industri besar dan industri menengah pangan olahan untuk membantu proses kemandirian usaha mikro kecil pangan olahan dengan berbagai skema yang disepakati bersama.

Hingga tahun 2022, sebanyak 16 perusahaan besar telah bergabung menjadi perusahaan Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan, diantaranya: 1) PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, 2) PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, 3) PT. Frisian Flag Indonesia, 4) PT. Tigaraksa Satria Tbk, 5) PT. Sarihusada Generasi Mahardhika, 6) PT. Nestle Indonesia, 7) PT. Mayora Indah Tbk, 8) PT. Niramasa Utama, 9) PT. Konimex, 10) PT. Kimia Farma Tbk, 11) PT. Heinz ABC Indonesia, 12) PT. Forisa Nusa Persada, 13) PT. Tempo Scan Pasific, 14) PT. Kino Indonesia, 15) PT. Glico Wings, dan 16) PT. Unilever Indonesia Tbk.

Telah dilakukan pembinaan kepada 13.423 UMK melalui kegiatan Bimtek Kemudahan Berusaha, Bimtek Sistem Pendokumentasian, *Coaching* dan Desk E-sertifikasi, Webinar Dapoer Kita Tematik Produk Olahan Susu, Bakeri, dan Produk

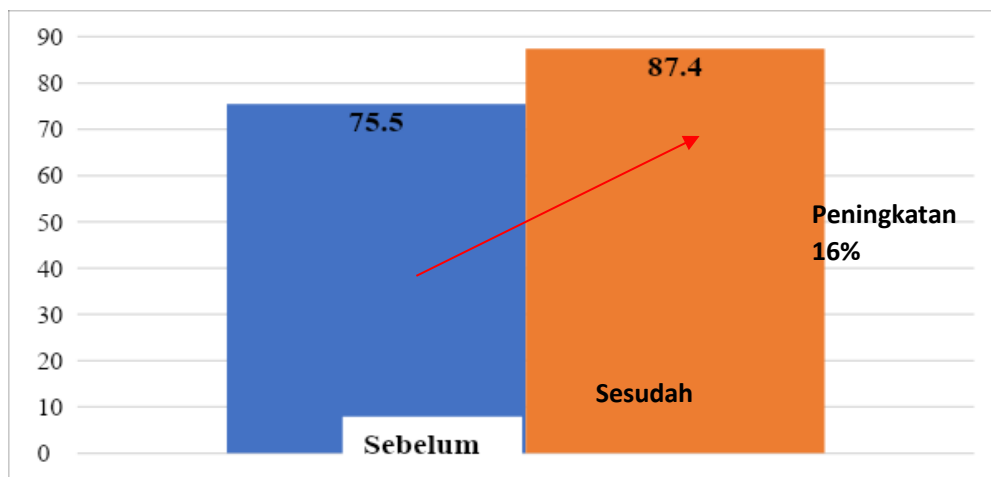
Olahan Kacang serta beberapa kegiatan lainnya kolaborasi Badan POM dengan perusahaan Orang Tua Angkat.



Gambar 50 Program Orang Tua Angkat untuk UMK

C. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KEAMANAN PJAS

Monitoring dan evaluasi PJAS Tahun 2022 dilakukan untuk menjamin dan memastikan agar program berjalan efektif dan efisien. Dari hasil monitoring kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan di tiap Provinsi telah berhasil meningkatkan pengetahuan para kader keamanan pangan. Rata-rata peningkatan skor pengetahuan para kader keamanan pangan meningkat antara 4-46% setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Secara nasional, rata-rata skor pengetahuan kader keamanan pangan sebelum mengikuti kegiatan bimbingan teknis adalah 75.5 dan meningkat menjadi 87.04 setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis (16%) (Gambar 51).



Gambar 51 Rata-rata Skor Pengetahuan Kader Keamanan Pangan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Bimbingan Teknis

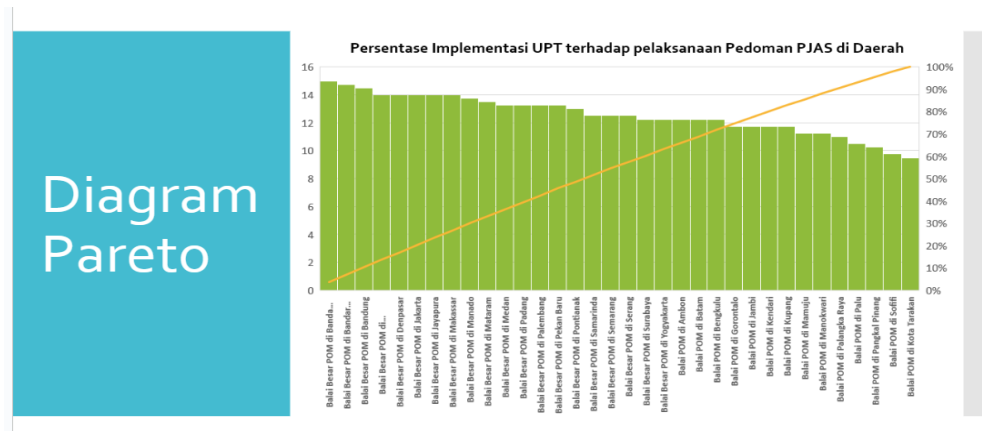
Sekolah dengan PJAS aman adalah sekolah yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan, yaitu memiliki kader keamanan pangan sekolah yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Sekolah dengan PJAS aman akan dilakukan sertifikasi setelah sekolah melakukan evaluasi mandiri.

Jumlah sekolah yang berhasil mendapatkan sertifikasi PJAS Aman berjumlah 712 sekolah. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan. Walaupun demikian, terdapat Provinsi Kalimantan Barat belum memenuhi target. Beberapa hal yang menyebabkan ketidaktercapaian target di wilayah tersebut adalah kader tidak pernah

sosialisasi, paket edukasi yang diberikan tidak dimanfaatkan masih tersimpan di lemari.

Selain dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPOM dalam implementasi PJAS. *Tools* penilaian kinerja UPT merupakan *tools* yang akan digunakan untuk mengukur salah satu capaian IKK dalam peta strategis Direktorat PMPUPO yaitu % UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai pedoman

No	Tahapan Pelaksanaan PJAS Per Desember 2022	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Advokasi Lintas Sektor	34 provinsi	34 provinsi (100%)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	3.300 sekolah	3.340 sekolah (101%)
3	Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah	679 sekolah	775 sekolah (114,13%)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	679 sekolah	1.199 sekolah (176,58%)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	679 sekolah	726 sekolah (106,92%)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	679 sekolah	712 sekolah (104%)
7	Pengawasan	1.362 sekolah	1.362 (100%)



Gambar 52 Evaluasi UPT BPOM dalam melaksanakan program PJAS

UPT yang memiliki nilai kepatuhan terhadap pelaksanaan implementasi PJAS sesuai pedoman < 80% adalah UPT di Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Mamuju, Manokwari, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Sofifi, dan Tarakan.

UPT tersebut perlu meningkatkan efektivitasnya dan kepatuhannya terhadap pedoman/ SOP yang telah di desain untuk implementasi PJAS. PIC Dit. PMPUPO untuk Balai terkait juga perlu lebih intensif dan mengingatkan setiap tahapan PJAS.

Hal tersebut menjadi penting karena target UPT yang melaksanakan kegiatan sesuai pedoman pada tahun 2023 akan meningkat sebesar 86%.

D. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN DESA PANGAN AMAN

Direktorat PMPU PO melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan desa pangan aman yang dilakukan oleh UPT BPOM. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap tahapan-tahapan kegiatan desa pangan aman yang dilakukan oleh UPT BPOM.

Total target desa/kelurahan yang harus diintervensi oleh UPT BPOM pada tahun 2022 adalah 221 desa/kelurahan di 80 kab/kota.

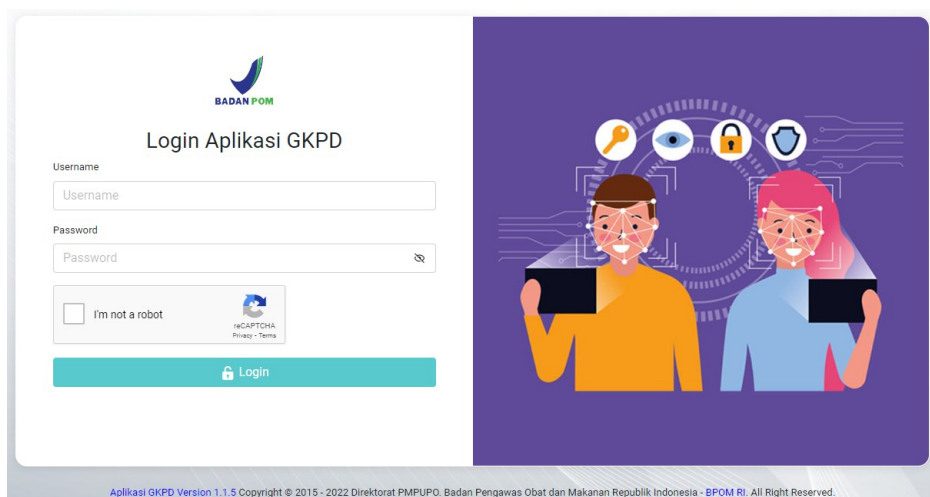
Dari total 221 desa/kelurahan yang diintervensi telah dilatih 3.315 kader keamanan pangan desa. Para KKPD tersebut, telah melaksanakan bimtek keamanan pangan dan fasilitasi keamanan pangan ke 11.050 orang yang berasal dari kelompok Ibu Rumah Tangga, remaja, sekolah, pelaku usaha pangan olahan (IRTP), Pelaku Usaha Pangan Siap Saji, Ritel.

No	Provinsi	Kabupaten			Desa/Kelurahan						
		Target	Capaian	Kecamatan	Target	Capaian	Nama Desa/Kelurahan	Stunting Risk	Status	Penyakit	
1	ACEH	4	4	KOTA BANDA ACEH KAB. PIDIE JAYA KAB. ACEH UTARA KOTA LHOEULUMAE	Sesuai	6	6	<ul style="list-style-type: none"> • Day • Paya • Jawang Mata Je • Uluh Ratak Teu • Paluh Lada • Cut Givik Kandang 	<ul style="list-style-type: none"> • Stunting • Non Stunting • Non Stunting • Non Stunting • Non Stunting • Non Stunting 	Sesuai	Jan-Ag
2	SUMATERA UTARA	5	5	KAB. TAPANULI UTARA KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. MANDAILING NATAL KOTA SIBOLGA	Sesuai	6	6	<ul style="list-style-type: none"> • Onan Banggai I • Batang Pinae I • Sidomella • Pitali Lumbang • Pasar Belakang • Pancuran Bambu 	<ul style="list-style-type: none"> • Non Stunting • Non Stunting • Non Stunting • Non Stunting • Stunting • Stunting 	Sesuai	Jan-Ag

Gambar 53 Dokumentasi Monitoring dan evaluasi Desa Pangan Aman melalui GKPD Online

Selain monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPOM, dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi pelaporan kegiatan Desa Pangan Aman bagi para penanggung jawab di Balai Besar/Balai POM telah dilakukan pengembangan aplikasi Desa Pangan Aman (gkpd.pom.goid). Pengembangan aplikasi GKPD *online* meliputi:

- Updating beberapa menu yang terdapat pada aplikasi seperti pada menu advokasi dan bimtek termasuk penyederhanaan dalam alur bisnis proses.
- Penambahan menu profil penginputan laporan Desa Pangan Aman oleh UPT BPOM.
- Uji coba aplikasi GKPD Online dengan tujuan untuk memastikan pengembangan pada aplikasi ini dapat dioperasikan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- Penyempurnaan aplikasi GPD online diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan GKPD di setiap provinsi secara rinci dan cepat untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Selain itu, data yang ada dalam aplikasi GKPD terhubung langsung dengan *BPOM Command Center* sehingga diharapkan aliran data yang dihasilkan selalu up to date, efektif dan efisien.

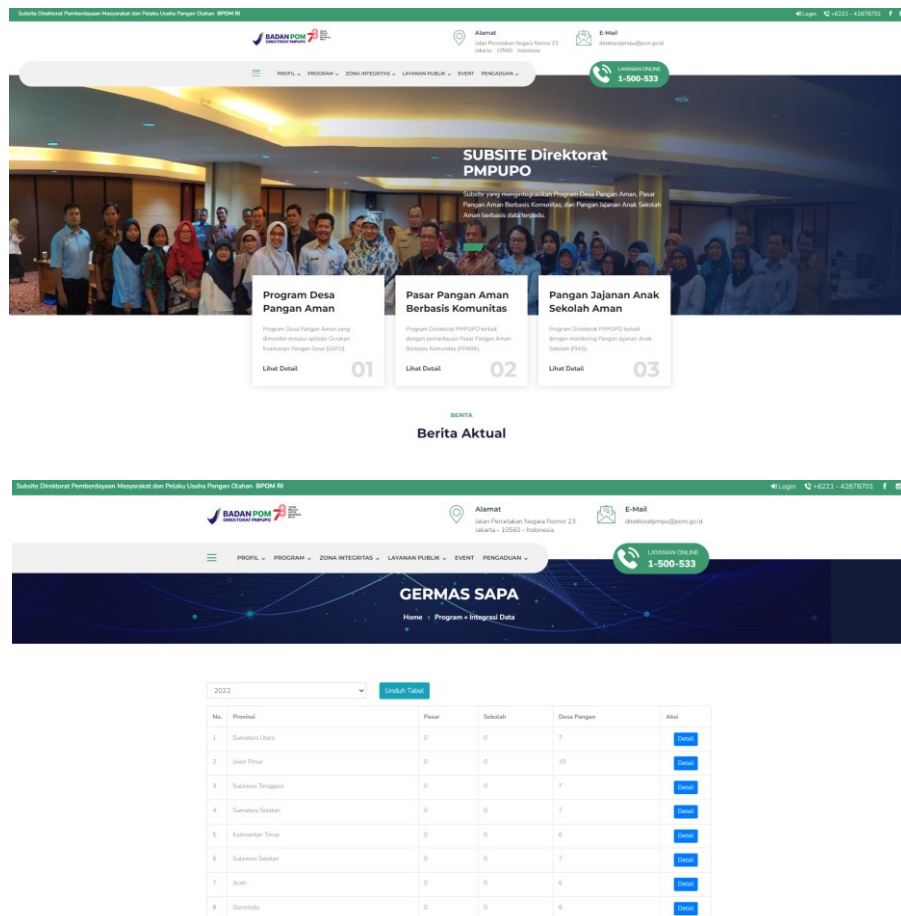


Gambar 54 Aplikasi GKPD Online

Selain itu, pada Tahun 2022 juga telah dikembangkan subsite Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Subsite ini merupakan media informasi terkait program-program Direktorat PMPUPO terutama program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) yang merupakan integrasi dari program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman

Berbasis Komunitas, dan PJAS Aman. Berikut ini pengembangan Subsite PMPUPO pada tahun 2022:

1. Integrasi data Desa Pangan Aman dengan Aplikasi GKPD *Online*
2. Pengembangan menu pelayanan publik
 - Sub Menu Jadwal Layanan
 - Sub Menu Manager on Duty
 - Sub Menu Laporan Petugas Pelayanan Publik
3. Updating menu Zona Integritas 6 area perubahan di subsite PMPUPO dalam rangka menuju instansi yang bersih dan melayani.



Gambar 55 Subsite PM

E. Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sejak tahun 2013 dengan nama program Pasar Aman Bebas dari Bahan Bahaya (PABB) yang kemudian direvitalisasi menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) sampai dengan saat ini.

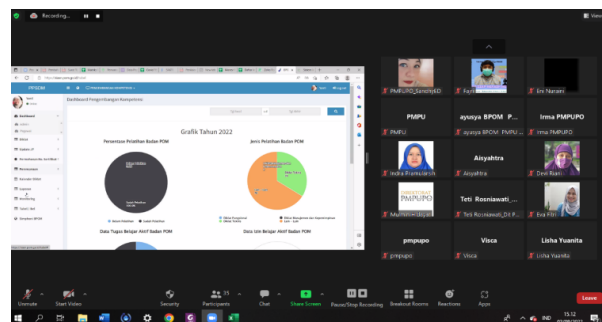
Capaian kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sejak tahun 2013– 2022 adalah sebagai berikut, sebanyak 463 pasar telah diintervensi, petugas pasar yang telah mendapat bimbingan teknis sebanyak 2.781 orang, 7.010 orang pedagang telah mendapat penyuluhan terkait keamanan pangan dan 13.830 orang pengunjung pasar telah mendapat sosialisasi keamanan pangan.

SK8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

3.8.1 Indeks RB Direktorat PMPUPO

IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI (RB)

Untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat, semua kelompok kerja (Pokja) secara rutin mengadakan pertemuan monitoring dan evaluasi tiap awal bulan. Pelaksanaan monev ini dilakukan setelah pembahasan monev capaian output dan realisasi anggaran.



Gambar 56 monitoring dan evaluasi

Selain itu, tahun 2022 Direktorat PMPUPO telah melaksanakan *Capacity Building* dan *Awarenes* Reformasi Birokrasi untuk seluruh ASN sebagai salah satu cara untuk menanamkan core values berakhlak, meningkatkan motivasi untuk implementasi RB menuju WBBM dan meningkatkan kerjasama tim. Acara ini dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung-Bali tanggal 15 September – 16 September 2022. Kabupaten Badung memiliki *mall* pelayanan publik, mendukung program Badan POM terkait UMKM dan program berbasis masyarakat yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PMPUPO. Tujuan kegiatan ini adalah a. Membangun *core values* ASN BERAKHLAK bagi seluruh pegawai Direktorat PMPUPO; b. Meningkatkan motivasi ASN untuk membangun WBBM di Direktorat PMPUPO; dan c. Dialog implementasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan perizinan dengan Balai Besar POM di Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung-Bali.

Pelaksanaan *Capacity Building* dan *Awarenes* Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menanamkan core values berakhlak, meningkatkan motivasi untuk implementasi RB menuju WBBM dan meningkatkan kerjasama tim di Direktorat PMPUPO sehingga memberikan kontribusi maksimal pada kinerja BPOM.



Gambar 57 Study banding ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung-Bali.

SK9. Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal

3.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO

A. FORUM KOORDINASI TEKNIS DEPUTI PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Forum ini merupakan wadah koordinasi di lingkungan Kedeputian 3. Tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembahasan terkait penyiapan data dukung yang perlu disampaikan Deputi 3 kepada Kemen PAN RB. Pembahasan dilakukan bersama masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) RB. Rapat Koordinasi Kedeputian III diselenggarakan di The Trans Luxury Hotel Bandung pada tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2022.



Gambar 58 Forum Koordinasi Teknis

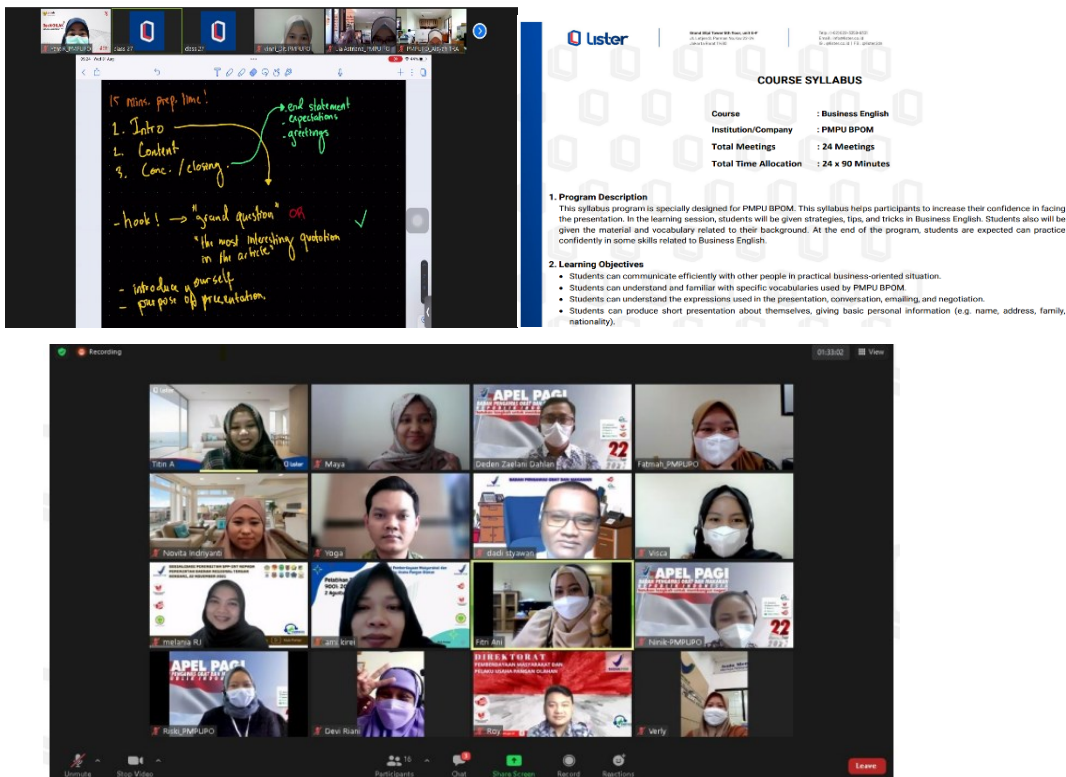
B. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Upaya peningkatan kompetensi pegawai terus dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Semua pegawai diingatkan untuk memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam setahun. Untuk pemenuhan pengembangan kompetensi, semua pegawai juga diingatkan untuk memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan BPOM yaitu melalui IDEAS.

Pada tahun 2022 Direktorat juga telah melaksanakan beberapa pelatihan dan workshop untuk seluruh pegawai, yaitu :

Pelatihan Bahasa Inggris: *Business English*

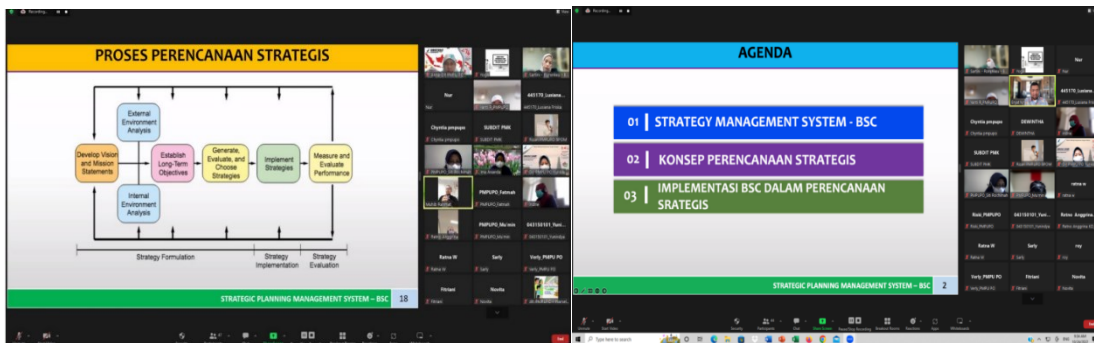
Pelatihan diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan selama 24 kali pertemuan dari bulan Juni - Desember 2022.. Peserta dibagi atas 3 kelas dengan tingkat yang berbeda sesuai dengan placement test di awal pelatihan. Peserta dilatih untuk terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris dan vc



Gambar 59 Kursus Bahasa Inggris bersama Lister

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Indikator dan Target Kegiatan yg SMART: SMART Plan.

Bimtek ini dilaksanakan pada 24 Oktober 2022. Pelatihan ini dilaksanakan agar para pegawai yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat lebih memahami dan menyusun perencanaan unit dengan baik, spesifik, dapat diukur dan dicapai, sesuai dengan kondisi riil dan ada batasan waktunya. Narasumber: Bapak Enjat Munajat dan Bapak Muhib Rahmat.



Gambar 60 Bimtek Perencanaan Indikator dan Target Kegiatan yg SMART: SMART Plan

Pelatihan Teknik Advokasi dan Negosiasi

Pelatihan ini dilaksanakan pada 26-27 April 2022. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam melakukan advokasi dan negosiasi. Narasumber Pelatihan ini yaitu Bapak Putut Wijanarko dan Hari Subagja.



Gambar 61 Bimtek Pelatihan Teknik Advokasi dan Negosiasi

Awareness ISO 9001:2015 Manajemen Mutu

Awareness ISO 9001: 2015 dilaksanakan untuk mererefresh semua pegawai terhadap sistem manajemen mutu QMS. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Direktorat diikuti oleh seluruh pegawai.

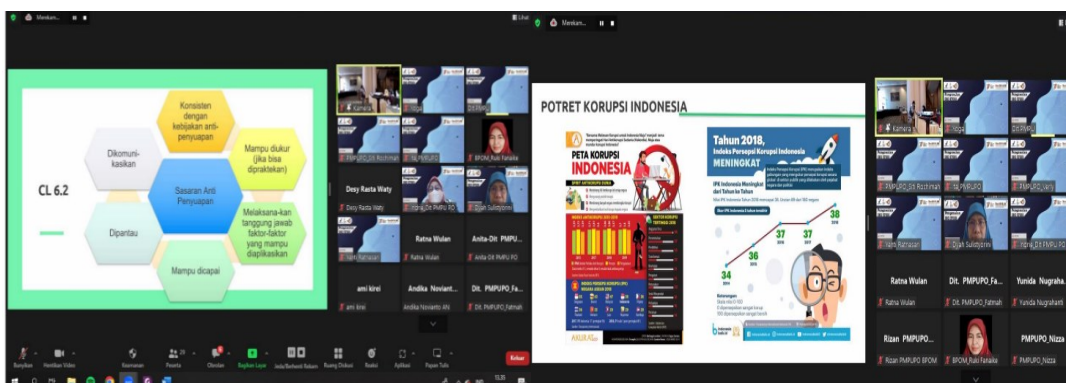


Gambar 62 Awareness ISO 9001:2015 Manajemen Mutu

Bimbingan Teknis ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Standar ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan antisuap. Dalam pelaksanaan ISO 37001 dilakukan penanaman budaya anti suap dalam suatu organisasi dan penerapan kontrol yang sesuai. Hal ini

akan meningkatkan peluang mendeteksi penyuapan sejak dini. Apakah ISO 37001 lebih detailnya dan bagaimana prosedur dan tools yang harus disiapkan, perlu kita pelajari bersama-sama agar dalam implementasinya nanti kita tidak salah persepsi. Bimtek terkait ISO Anti Penyuapan ini pada seluruh pegawai perlu dilakukan agar kita semua memahami isi ISO tersebut, sehingga dapat kita siapkan dan implementasikan dengan sebaik-baiknya. Setelah mengikuti bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terkait penerapan Anti Penyuapan sesuai dengan aturan ISO yang ada.



Gambar 63 Bimbingan Teknis ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Capacity building Berfikir Kreatif untuk Berkembang dan Sukses

Kegiatan *capacity building* dilaksanakan di Bali tanggal 14 - 17 September 2022 diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan dilaksanakan untuk memberi semangat seluruh pegawai untuk dapat bekerja dan berpikir kreatif. Kegiatan *capacity building* ini juga dalam rangka meningkatkan *awareness* dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) bagi seluruh pegawai Direktorat.



Gambar 64 Capacity building dilaksanakan di Bali, 14 - 17 September 2022

Workshop Analisis data sebagai dasar kebijakan: *Pivot Tabel*

Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan cara pengolahan data untuk mempermudah dalam penyajian data. Metode pengolahan data menggunakan *excel/Pivot table*. Narasumber workshop ini yaitu Dendy Dwi Widyanto, S.Ak dari Kementerian Keuangan.



Gambar 65 Workshop Analisis data sebagai dasar kebijakan: *Pivot Tabel*

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

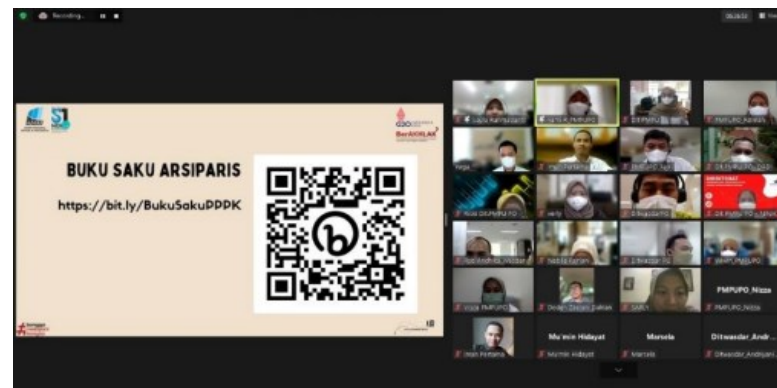
Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset Negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban BMN ini mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh. Agar BMN ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan akuntabel, maka perlu pengelolaan terkait BMN ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu pegawai perlu diberi pengetahuan terkait aturan yang berlaku. Narasumber bimtek ini yaitu Poppy Widya Sari Siregar dan Harum Murti dari Kemenkeu.



Gambar 66 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara 2023

Bimtek Kearsipan

Badan POM sangat memerlukan tenaga yang mengelola arsip yang dimiliki. Agar pengelolaan arsip dapat terus berjalan lancar dan benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi bagi semua petugas yang membantu dalam pengelolaan arsip. Bimtek ini diikuti oleh 30 orang pegawai dengan tujuan agar para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan kearsipan mampu mengelola arsip dengan baik dan benar, sehingga arsip dapat tersimpan dengan rapi, terjaga keamanannya dan mudah ditemukan jika diperlukan. Narasumber bimtek ini berasal dari ANRI.



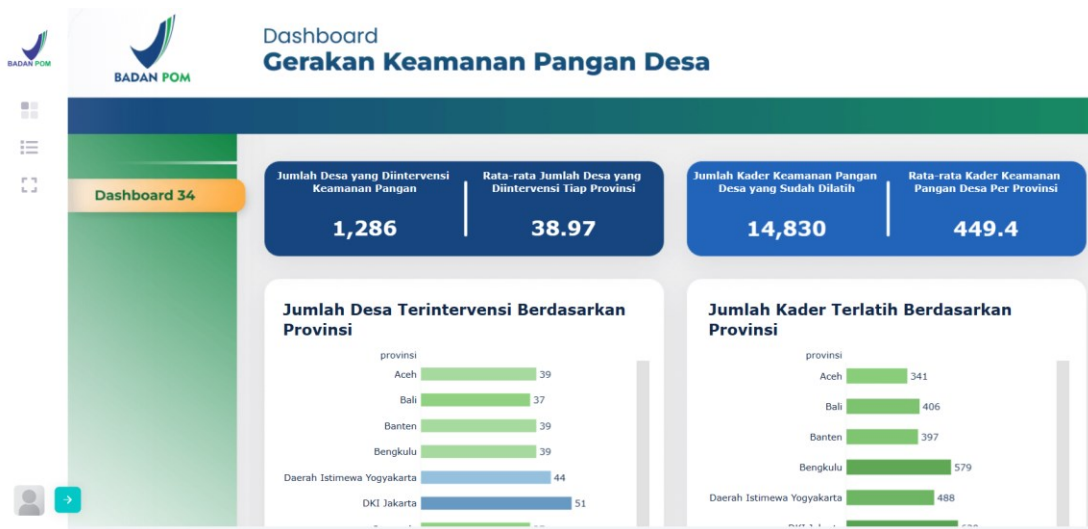
Gambar 67 Bimtek Kearsipan bagi Petugas Arsip Dit PMPUPO Tahun 2022

SK 10. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan

3.10.1 Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di Dit. PMPU

Pengelolaan TIK

Pengelolaan data dan informasi diutamakan dengan pemantauan update data di subsite command center BPOM ([BPOM Operational Center](#)) serta pemanfaatan email corporate oleh seluruh pegawai Direktorat. Tampilan dashboard BOC Dit PMPUPO meliputi Data Gerakan Keamanan Pangan Desa yaitu Jumlah Desa yang terintervensi berdasarkan provinsi dan Jumlah Kader Terlatih berdasarkan Provinsi.



Gambar 68 Tampilan Dashboard BOC untuk data Gerakan Keamanan Pangan Desa

Pemanfaatan *email corporate* dipantau tiap bulan. Bagi pegawai yang tidak mengakses email corporate dalam 1 bulan, dinyatakan email pegawai yang bersangkutan tidak aktif. Untuk itu, diingatkan secara intensif kepada seluruh pegawai melalui WA grup untuk mengakses dan memanfaatkan email corporate dalam berkomunikasi dalam rangka keperluan tugas dan kegiatan Direktorat.

Berdasarkan penilaian Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diperoleh Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal di Dit PMPUPO tahun 2022 adalah 2,75(121%) dari target 2,25.

Tahun 2022 pengadaan Dit PMPUPO yang dilakukan yaitu pengadaan laptop sebanyak 15 (lima belas) unit untuk pegawai. Pengadaan ini merupakan upaya agar kinerja yang dihasilkan pegawai Dit PMPU dan Kedepuyan 3 akan terus meningkat.

Selain itu, subsite dan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim di Direktorat juga terus dipantau. Terdapat 9 (sembilan) aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat, dengan dibantu pemantauan dan penyimpanan datanya di server Pusat Data dan Informasi (Pusdatin BPOM). Namun dari 9 (sembilan) aplikasi ini, ada 2 (dua) aplikasi yang sedang dalam proses penghapusan karena sudah tidak digunakan lagi. Kedua aplikasi tersebut sudah tidak sesuai kebutuhan saat ini, yaitu e-learning PKP DFI dan Pusat Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Ketujuh aplikasi yang masih aktif digunakan yaitu :

- Istana UMKM.pom (istanaumkm.pom.go.id)
- Aplikasi Pelaporan IRTP (sppirt.pom.go.id)
- Gerakan Keamanan Pangan Desa Online (gkpd.pom.go.id)
- Sistem Informasi Pangan Aman dari Bahan Berbahaya (sipaman.pom.go.id)
- Sistem Aplikasi Sekolah Pangan Aman (siapsapa.pom.go.id)
- Subsite PMPUPO (pmpupo.pom.go.id)
- KlubPompi (klubpompi.pom.go.id)

Tabel 12 Tabel 12 Aplikasi yang dikembangkan oleh Dit.PMPUPO

Nama Aplikasi	Domain	Keterangan (Aktif/tidak)	Deskripsi/Fungsi Aplikasi	Tahun Pembangunan dan Pengembangan	Platform			SSL	Alamat server	Capture tampilan	
					Database	Bahasa Pemrograman	OS(Operasion System)				
Aplikasi e-Learning PKP DFI	pkpdfi.pom.go.id	Tidak	Aplikasi yang digunakan untuk e-learning petugas PKP dan DFI	2013	MySQL	PHP Codeigniter	Ubuntu Linux 64-bit	Apache	Tidak	10.59.0.11	
Istana U MKM	istanaumkm.pom.go.id	Aktif	dirintis oleh B POM sebagai bentuk upaya kolaborasi, sinergisme dan inovasi diantara Kementerian/Lembaga dan industri terkait pangan, obat tradisional dan kosmetika, termasuk akademisi.	2015	MySQL	CI MS October CMS, based on PHP	Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit)	Apache	Tidak	10.59.0.101	
Pusat Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	puspaman.pom.go.id	Tidak	Informasi terkait program pasar aman dari bahan berbahaya	2016	MySQL	PHP	Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit)		Tidak	10.59.0.103	
Aplikasi Pelaporan IRTP	sppirt.pom.go.id	Aktif	Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaporkan penerbitan SPP-IRT dan database SPP-IRT	2014	MySQL	PHP Codeigniter	Ubuntu Linux (64-bit)		Tidak	10.59.0.11	
Gerakan Keamanan Pangan Desa Online	gkpd.pom.go.id	Aktif	informasi dan pelaporan terkait kegiatan desa pangan aman	2014	MySQL	PHP Codeigniter	Ubuntu Linux (64-bit)	Apache	Tidak	10.59.0.102	
Sistem Informasi Pangan Aman	siapan.pom.go.id	Aktif	Pelaporan Hasil Uji dan sampling bahan berbahaya dan mikrobiologi dalam program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2016	MySQL	ASP	Ubuntu Linux (64-bit)	IIS	Tidak	10.59.0.166	
Sistem Aplikasi Sekolah Pangan Aman	slapsapa.pom.go.id	Aktif	1.Membantu B POM Pusat untuk memantau dan mengumpulkan data kegiatan secara berkala. 2.Membantu Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia dalam melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan 3.Menampilkan ringkasan data kegiatan secara efisien.	2018	MySQL	PHP Laravel	Ubuntu Linux (64-bit)	Apache	Ya	10.59.0.105	
Subsiste Dit. PMPUPO	pmpupo.pom.go.id	Aktif	Aplikasi ini merupakan salah satu quick wins B POM dalam rangka revitalisasi Program Germas. Sapa yaitu untuk mengintegrasikan data Pro PN (desa, pasar, sekolah) yang dibangun tahun 2020	2020	MySQL	PHP Codeigniter	Ubuntu Linux (64-bit)	Apache	Tidak	10.59.0.104	
Klub Pompi	Klubpompi.pom.go.id	Aktif	Pusat Informasi Pangan Jajanan Anak Sekolah Klub Pompi adalah sarana kita berbagi informasi dan ide tentang isu-isu makanan. Baik tentang gizi, mutu, pencemaran, makanan aman dan tidak aman	2015	MySQL	PHP Joomla	Ubuntu Linux (64-bit)	Apache	Tidak	10.59.0.100	

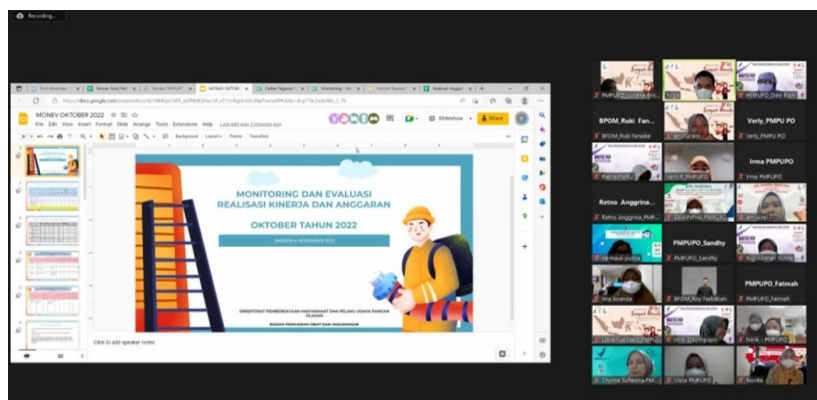
SK 11. Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel

3.11.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO

A. MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PMPUPO

Dukungan administrasi ini sebagai supporting berjalannya operasional Direktorat selama 1 tahun anggaran. Dukungan ini berupa penyediaan biaya keperluan kantor sehari-hari, penyediaan ATK dan pencetakan, konsumsi rapat, pengadaan dan maintenance alat pengolah data, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu juga dukungan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, maupun luar kota, baik untuk pimpinan maupun petugas.

Monitoring dan evaluasi capaian indikator kegiatan dan realisasi anggaran dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan. Dengan monev secara rutin ini diharapkan capaian indikator dan realisasi anggaran terpantau dengan baik, bila ada kendala dapat segera diupayakan rencana tindak lanjut agar hambatan dapat dikendalikan.



Gambar 69 Rapat monitoring dan evaluasi bulanan

B. PENGELOLAAN SATKER

Pengelolaan administrasi keuangan berperan penting dalam membantu kelancaran proses penyelesaian berkas pertanggungjawaban dan pencatatan dokumen dalam rangka penyerapan anggaran di Kedepuitan 3, termasuk untuk pencapaian target efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPUPO. Operasional Satker digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan di Satker Kedepuitan III sehingga proses pengelolaan anggaran berjalan lancar. Beberapa kali pertemuan dilakukan untuk konsolidasi agar proses administrasi tertib dan lancar sesuai target.



Gambar 70 Pengelolaan Satker

BAB IV PENUTUP

Sepanjang tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi Badan POM. Pada laporan tahunan 2022 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 11 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Dari kelima belas indikator, terdapat, 14 indikator dengan kategori baik dan 1 indikator dengan kategori cukup. Indikator kinerja yang kategori cukup yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Perolehan penilaian Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan masih belum mencapai target (98,55%). Masih perlu upaya perbaikan sedikit lagi agar dapat memperoleh nilai sesuai target. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada akhir tahun mencapai 99,99%.

Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja dan juga kualitas pelayanan publik. Beberapa penghargaan yang diraih juga makin memacu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk dapat memberikan kinerja terbaik kepada masyarakat. Namun, masih tetap diperlukan monitoring dan evaluasi berkala di berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses bisnis pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan menjadi lebih baik lagi.

Diharapkan ke depan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seluruh staf dan menjalin kerjasama yang semakin baik dengan pihak-pihak internal di lingkungan Badan POM sendiri maupun eksternal yaitu para stakeholders.

Lampiran

Tabel 13 Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya

No	Nama Barang	2019	2020	2021	2022
1	Backdrop	3	3	3	3
2	Mesin Ketik Listrik	1	1	1	1
3	Dispenser	4	4	3	3
4	Lemari Besi/ Metal	22	22	22	22
5	Lemari Kayu	10	10	10	10
6	Locker	2	2	2	2
7	Kulkas	3	3	3	3
8	Alat Penghancur Kertas	1	1	1	1
9	LCD Projector/ Infocus	8	8	4	4
10	Meja Kerja Kayu	49	49	45	45
11	KursiBesi/ Metal	41	41	41	41
12	Meja Rapat	2	2	2	2
13	Meja Receptionis	1	1	1	1
14	Televisi	2	2	2	2
15	Handy Cam	3	3	3	3
16	Kursi Dorong	74	74	74	74
17	Microwave	2	2	2	2
18	Laser Pointer	5	5	5	5
19	Backdrop	3	3	3	3
20	Mesin Ketik Listrik	1	1	1	1
21	Video Keamanan Pangan	3	3	3	3
22	Camera digital	5	6	6	6
23	Telephone (PABX)	1	1	1	1
24	Sofa	1 set	1 set	1 set	1 set
25	Pesawat Telephone	3	3	3	3
26	Facsimile	3	3	3	3
27	Meja Besi	1	1	1	1
28	Meja + Kursi Kayu	1 set	1 set	1 set	1 set
29	P.C Unit	61	63	61	61

30	Note Book	43	52	60	75
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	55	55	55
32	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	7	8	8
33	External/ Portable Hardisk	12	13	8	8
34	Server	4	4	4	4
35	Software Computer	11	12	12	12
36	Brankas	2	2	2	2
37	Tablet	1	2	2	2
38	Maket Makanan	1	1	1	1
39	Mobil minibus	1	1	1	1